



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN
TAHUNAN
2022

MENATA SISTEM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL



**LAPORAN
TAHUNAN**
MAHKAMAH KONSTITUSI
2022

VISI

**MENEGAKKAN KONSTITUSI
MELALUI PERADILAN YANG MODERN
DAN TERPERCAYA**



MISI

**1. MEMPERKUAT INTEGRITAS
PERADILAN KONSTITUSI**

**2. MENINGKATKAN KESADARAN
BERKONSTITUSI WARGA NEGARA
DAN PENYELENGGARA NEGARA**

**3. MENINGKATKAN
KUALITAS PUTUSAN**

KEWENANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR YANG PUTUSANNYA BERSIFAT FINAL UNTUK:

- 1 **MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR**
- 2 **MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR**
- 3 **MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**
- 4 **MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM**
- 5 **WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR**

BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022, MK BERWENANG MEMUTUS PERKARA PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

SAPTA KARSA

KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

1

PRINSIP INDEPENDENSI

Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dan tekanan dari luar.

2

PRINSIP KETAKBERPIHAKAN

Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak serta menampilkan perilaku netral baik di dalam maupun di luar persidangan.

3

PRINSIP INTEGRITAS

Hakim konstitusi memiliki kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas secara profesional.

HUTAMA



PMKNomor09/PMK/2006TentangPemberlakuan
Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

4 **PRINSIP KEPANTASAN DAN KESOPANAN**

Hakim konstitusi mampu menempatkan dengan tepat serta berperilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi.

5 **PRINSIP KESETARAAN**

Hakim konstitusi memperlakukan semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain (*equal treatment*).

6 **PRINSIP KECAKAPAN DAN KESEKSAMAAN**

Hakim konstitusi senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pribadi yang menggambarkan kecermatan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

7 **PRINSIP KEARIFAN DAN KEBIJAKSANAAN**

Hakim konstitusi bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat.

NILAI ICT

PADA LEMBAGA PERADILAN

INTEGRITY

Integritas sebagai modal insani agar tidak terjadi *loss of human identity*



CLEAN

Bersih dari upaya-upaya koruptif serta menguntungkan diri sendiri



TRUSTWORTHY

Elemen terpenting untuk menghadapi pembentukan dan penegakan hukum di era disrupsi



PENGANTAR

Laporan tahunan kali ini dikemas “berbeda” dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data dan diinformasi ditampilkan dengan cara berbeda, tanpa sama sekali mengurangi muatan bobot informasi, derajat transparansi, dan nilai akurasi. Hal ini sesuai dengan pergeseran umum perilaku masyarakat pada era digital yang salah satunya tampak dari tradisi bermedia sosial. Dari yang dulu menyukai tradisi naratif bergeser ke gemar dengan tampilan informasi yang atraktif, ringkas, dan jelas. Maka, selain bertujuan membangkitkan interest, pilihan display demikian dimaksudkan untuk memudahkan dan menyegerakan pembaca memahami substansi informasi yang ditampilkan.

Judul “Menata Sistem Demokrasi Konstitusional” dipilih sebagai penanda bahwa rentang-kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2022 berpusar dari isu sebagaimana diksi judul. Terlebih, sejak 2022, MK tidak sedikit menerima dan memutus perkara berkenaan dengan undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah. Bukankah pemilu identik dengan demokrasi konstitusional, dan begitu pula sebaliknya?

Hal demikian sebagaimana terlihat misalnya, UU Pemilu diuji sebanyak 25 kali. Sementara UU Pilkada diuji sebanyak 7 kali. Lebih lanjut, sejumlah putusan MK yang mendapat atensi publik (viral) beririsan dengan pemilihan umum, seperti soal presidential threshold, verifikasi parpol, tindak lanjut putusan DKPP yang memungkinkan di PTUN, mantan napi psikotropika dalam kontestasi pilkada, kewenangan menentukan daerah pemilihan dalam pemilu, dan kewenangan MK memutus perselisihan hasil pilkada yang kini permanen tidak lagi transisional. Putusan tersebut menegaskan peran dan kontribusi yang signifikan dalam penataan demokrasi, utamanya menjelang pemilu serentak 2024. Mengenai pilihan warna kombinasi dominan kuning (emas), putih, dan hitam dalam Laporan Tahunan ini, dipilih untuk merepresentasikan aura positif yang melingkupi MK. Kuning emas dimaknai sebagai prestasi, kemegahan, dan kemampuan atau keberhasilan dalam menyikapi segala kondisi. Warna putih melambangkan aspek kemurnian, kebersihan, dan keseimbangan. Warna hitam merupakan simbol kekuatan, keberanian, dan keseriusan. Kombinasi makna-makna sedemikian rupa itulah yang ditampilkan untuk mewakili secara paripurna entitas, performa, dan perwajahan MK sebagai peradilan konstitusi selama 2022.

MENATA SISTEM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2022

xiv + 88 hal; 210 x 297 mm
Cetakan Pertama, Mei 2023



Penerbit

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 23529000

email: office@mkri.id

www.mkri.id

TIM PENYUSUN

DEWAN PENGARAH Anwar Usman
Saldi Isra
Arief Hidayat
Wahiduddin Adams
Suhartoyo
Manahan M.P. Sitompul
Enny Nurbaningsih
Daniel Yusmic P. Foekh
M. Guntur Hamzah

PENGARAH Heru Setiawan
Muhidin

PENANGGUNG JAWAB Heru Setiawan

KOORDINATOR Triyono Edy Budhiarto
Wiryanto
Ida Ria Tambunan
Kurniasih Panti Rahayu
Tatang Garjito
Teguh Wahyudi
Elisabeth
Imam Margono
Sigit Purnomo

KETUA DAN PENYELARAS AKHIR Fajar Laksono

SEKRETARIS Mutia Fria Darsini

DESAIN COVER Hermanto

DESAIN DAN TATA LETAK Teguh Birawa Putra
Rudi
Nur Budiman
Hermanto

DOKUMENTASI FOTO Ifa Dwi Septian
R. Widjaya

INFOGRAFIS Zahra Marida Putri
Ilham Erwin

PENULIS Nur Rosikin
Lulu Anjarsari P.
Nano Tresna A.
Sri Pujiанти
Utami Argawati
Ilham Wiryadi
Bambang Panji Erawan
Bayu Wicaksono

BAHAN DAN DATA Tiara Agustina
Fitri Yuliana
Raisa Ayudhita
Andhini Sayu Fauzia
Rudi Kurniawan

DAFTAR ISI

VISI, MISI	ii
KEWENANGAN	iii
SAPTA KARSA HUTAMA	iv
<u>NILAI ICT (INTEGRITY, CLEAN, TRUSTWORTHY)</u>	<u>vi</u>
<u>PENGANTAR</u>	<u>vii</u>
<u>DAFTAR ISI</u>	<u>x</u>
<u>PUBLIKASI MK</u>	<u>xi</u>
<u>PRAKATA PANITERA DAN SEKRETARIS JENDERAL</u>	<u>xiii</u>
<u>MENGADILI PERKARA KONSTITUSI</u>	<u>1</u>
MEMPERKUAT INTEGRITAS PERADILAN KONSTITUSI	23
<u>MENINGKATKAN KESADARAN BERKONSTITUSI</u>	<u>48</u>
<u>MENINGKATKAN KUALITAS PUTUSAN</u>	<u>74</u>
<u>PROYEKSI 2023</u>	<u>86</u>
<u>LAMPIRAN</u>	<u>88</u>

PUBLIKASI MK



**MAJALAH
KONSTITUSI**



**JURNAL
KONSTITUSI**



**CONSTITUTIONAL
REVIEW**



SELAMAT MELANJUTKAN PENGABDIAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA



Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM pada 23 November 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114 P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan DPR yang ditetapkan 3 November 2022.

SELAMAT MENUNAIKAN TUGAS SEBAGAI HAKIM KONSTITUSI

PRAKATA



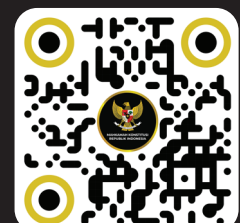
// Ali bin Abi Thalib berkata, *orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat*. Sejalan dengan itu, kami hantarkan Laporan Tahunan 2002 ini sebagai media untuk menyampaikan secara jujur dan terus terang mengenai Mahkamah Konstitusi, yang memang masyarakat seharusnya mengetahui. Mudah-mudahan, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat itu, senantiasa dihadirkan bersama-sama Mahkamah Konstitusi. //

Muhidin
Panitera



// Melalui rangkaian data, angka, garis, grafis, dan warna dalam lembar-lembar bundel Laporan Tahunan ini, kami sampaikan secara akuntabel dan terbuka kepada publik, kepada seluruh pemangku kepentingan, mengenai apa yang diikhtiarkan, dilakukan, dan diperoleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022, sekalian dengan apa yang akan dilakukan pada tahun 2023. Ini seperti makna akuntabilitas yang dikatakan Pearl Zhu, penulis buku, *Akuntabilitas berarti mengatakan apa yang kamu lakukan serta melakukan apa yang kamu katakan!* //

Heru Setiawan
Plt Sekretaris Jenderal



MENGADILI PERKARA KONSTITUSI



Tahun ini, MK berusia 19 tahun. Hitungan sejak didirikan pada 2003 silam. Di rentang waktu hingga 2022, MK menjalankan 3 dari 5 kewenangannya: pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada). Dari pelaksanaan 3 kewenangan, MK menerima dan menangani 3.463 perkara.



PERKARA KONSTITUSI 2003–2022

Setiap perkara harus ada akhirnya. *Litis finiri oportet*. Bukan cuma berkepastian hukum, putusan juga harus berkeadilan. Dari 3.463 perkara, MK telah memutus **3.444 perkara**.

BERDASARKAN KEWENANGAN



3.463 PERKARA

SKLN 29

PHPU 676

PHPKADA 1.136

PUU 1.622

3.444 PUTUSAN

BERDASARKAN AMAR

433
DIKABULKAN
(12,6%)

1.521
DITOLAK
(44,2%)

1.181
TIDAK DAPAT DITERIMA
(34,3%)

Melalui putusan, MK menjawab dalil permohonan. Argumentasi hukum dan konstitusi disusun cermat dan seksama. Pertimbangan dan pendapat hukum dituliskan, lahirlah amar. Ada amar Dikabulkan, Ditolak, atau Tidak Dapat Diterima. Di samping itu, ada perkara yang Ditarik Kembali, Tidak Berwenang, atau Gugur.



3.444
PUTUSAN



221
DITARIK KEMBALI
(6,4%)

66
TIDAK BERWENANG
(1,9%)

22
GUGUR
(0,6%)

PERKARA KONSTITUSI 2022

BERDASARKAN KEWENANGAN

Dua jenis perkara ditangani MK pada 2022; 143 perkara PUU dan 3 perkara perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Yalimo, yaitu Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2022, 153/PHP.BUP-XIX/2022, dan 154/PHP.BUP-XIX/2022.

JUMLAH PERKARA

146

143 PERKARA
PUU

3 PERKARA
PHP KADA

Rangkaian proses mengadili perkara konstitusi berakhir di putusan. Dari 146 perkara, 128 perkara tuntas diputus MK. Perkara PUU selesai 124 putusan. Serta sebanyak 3 perkara perselisihan hasil pilkada Kabupaten Yalimo yang teregistrasi pada 2022 dan Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Yalimo yang diregistrasi pada 2021.

JUMLAH PUTUSAN

128

124 PUTUSAN
PUU

4 PUTUSAN
PHP KADA

PERKARA PUU

Untuk perkara PUU, 121 perkara diregistrasi 2022. Ada 22 perkara yang diregistrasi pada tahun sebelumnya.



PERKARA UJI MATERIIL DAN FORMIL

Berdasarkan Pasal 51A UU MK, permohonan PUU dapat diajukan, baik pengujian formil yang menyangkut proses pembentukan UU, dan/atau pengujian materiil yang berkenaan dengan konstitusionalitas substansi UU. Ada permohonan uji formil, uji materiil, atau keduanya, uji formil dan materiil sekaligus dalam satu permohonan.

Dari 124 perkara PUU yang diputus, MK memutuskan dengan amar Dikabulkan sebanyak 15 putusan, Ditolak sebanyak 48 putusan, dan Tidak Dapat Diterima sebanyak 42 putusan. Di samping itu, sebanyak 18 perkara ditarik kembali dan 1 perkara Gugur.



PUTUSAN INKONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

Dari 15 putusan PUU yang dikabulkan selama 2022, satu putusan menyatakan inkonstitusional terkait badan peradilan khusus Pilkada dalam UU Pilkada, yakni Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022. Sementara, 14 putusan dikabulkan dengan amar inkonstitusional bersyarat.



UNDANG-UNDANG TERBANYAK DIUJI



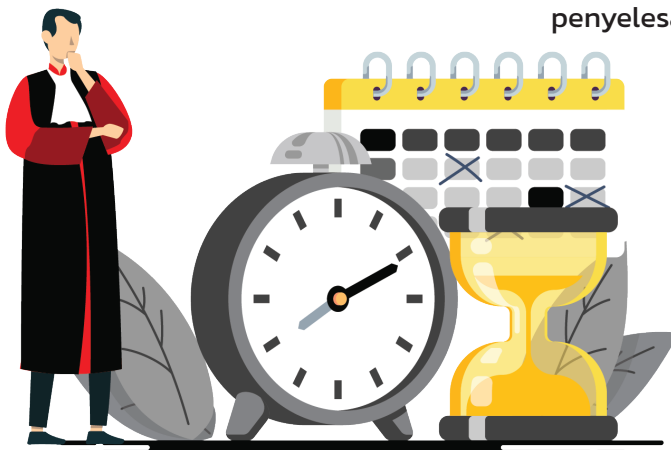
Awal tahun 2022, MK telah memutuskan empat Perkara perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Yalimo yang merupakan kelanjutan rangkaian proses Pilkada Serentak Tahun 2020. Satu perkara diputus dengan amar Tidak dapat Diterima. Untuk tiga perkara lainnya, melalui Ketetapan, MK menyatakan Tidak Berwenang mengadili.

PERKARA PHP KADA



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA

Justice delayed is justice denied. Terlambat memberikan keadilan merupakan bentuk lain ketidakadilan. Untuk itu, kecepatan waktu penyelesaian perkara merupakan bagian integral MK dalam mengadili perkara. Untuk memutus 124 perkara PUU, MK memerlukan waktu 2,6 bulan per perkara. Tahun lalu, MK membutuhkan 2,97 bulan per perkara. Artinya, jangka waktu penyelesaian perkara tahun ini lebih cepat.



PERSIDANGAN



Untuk menangani 143 perkara PUU dan 4 perkara perselisihan hasil pilkada, MK menggelar 527 persidangan terdiri dari 271 sidang pleno dan 256 sidang panel. Sementara jika dikategorikan ke dalam persidangan perkara, maka dari sebanyak 527 persidangan terdiri dari 254 persidangan pendahuluan; 145 pemeriksaan persidangan; serta 128 pengucapan putusan.

PERKARA PUU



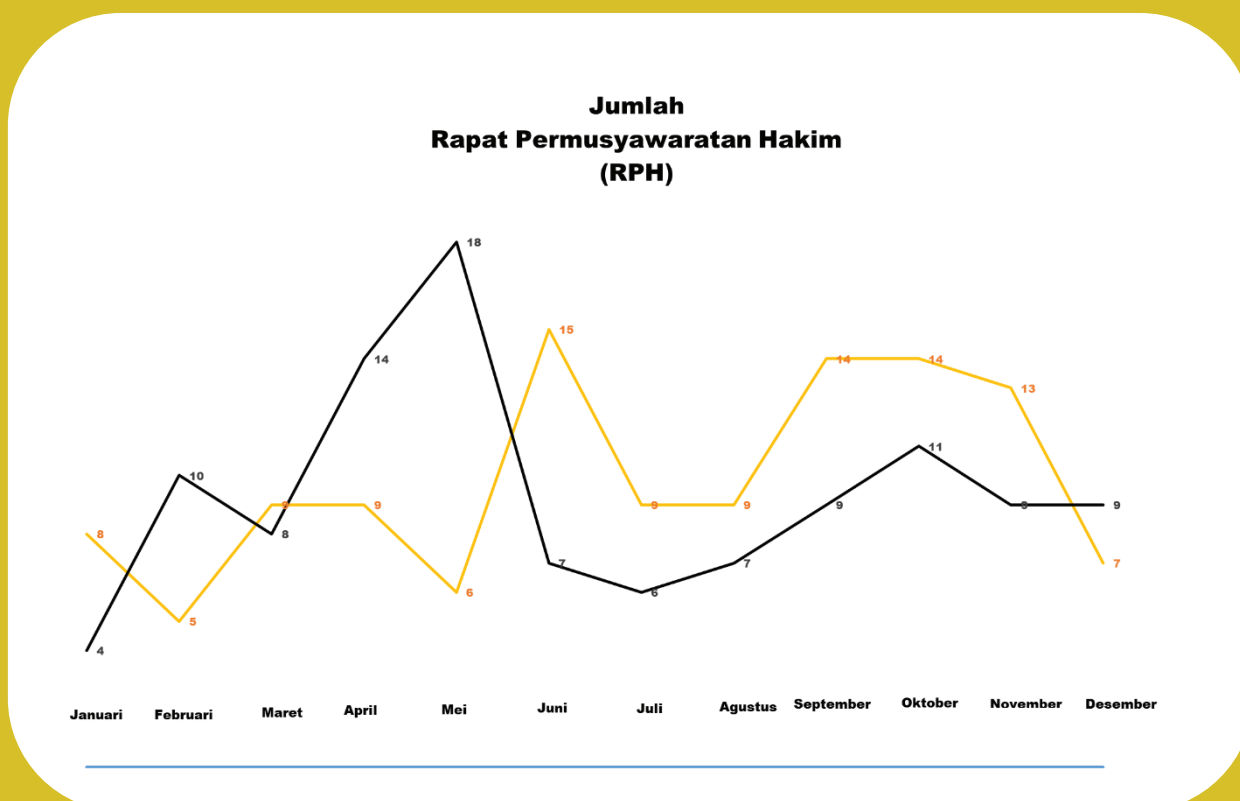
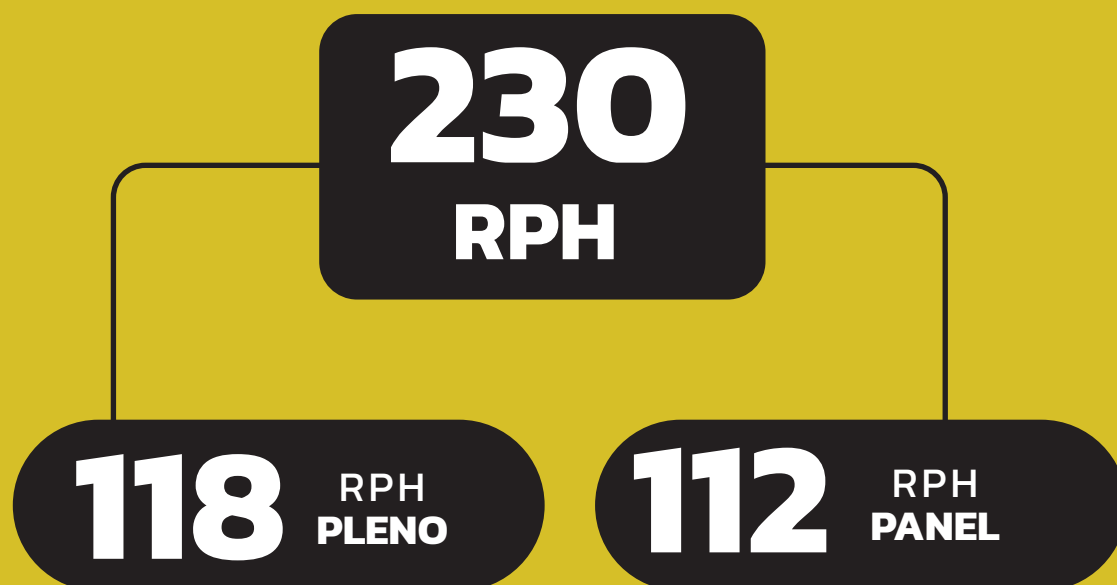
PERKARA PHP KADA



RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH)



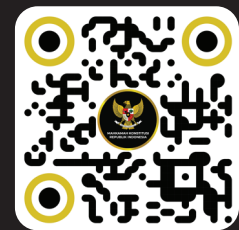
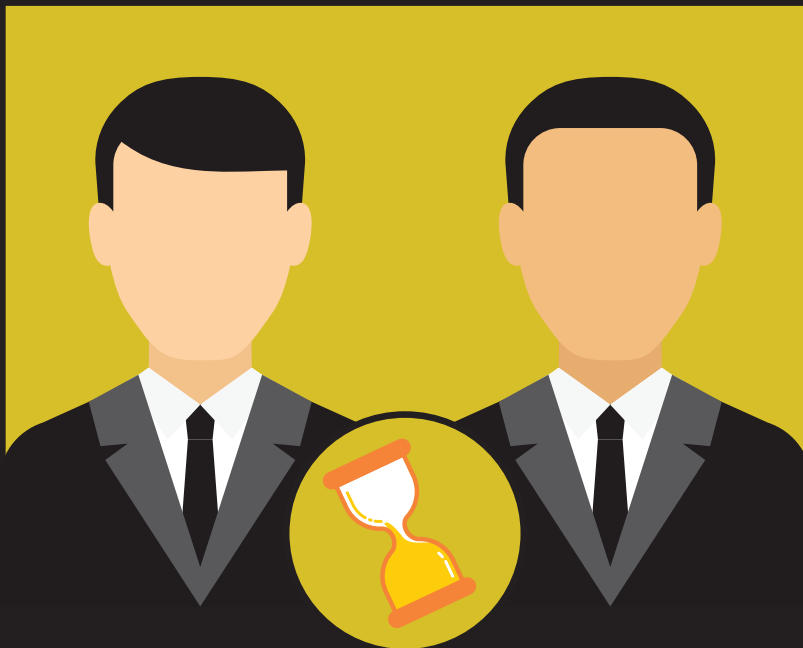
RPH diselenggarakan untuk membahas surat-surat terkait perkara, pembahasan perkara, pengambilan putusan, dan finalisasi putusan. Untuk menangani sebanyak 147 perkara, MK menggelar sebanyak 230 RPH.



PUTUSAN VIRAL

Dari 124 putusan pada 2022, sejumlah putusan mendapat perhatian masyarakat, atau yang secara masif saat ini diistilahkan dengan viral, betapapun tidak selalu merupakan putusan dengan amar Dikabulkan.

1 PRESIDENTIAL THRESHOLD KONSTITUSIONAL



MK kembali memutus norma syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam UU Pemilu adalah konstitusional. Sementara, berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase *presidential threshold* merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) yang menjadi domain pembentuk undang-undang. Pendirian Mahkamah tersebut berpijak pada perlunya penguatan sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Tahun ini, ada 10 putusan yang berkaitan dengan pengujian norma *presidential threshold*.

DIFERENSIASI VERIFIKASI FAKTUAL PARPOL PESERTA PEMILU 2024

MK menegaskan bahwa Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun terhadap partai politik yang (1) tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, (2) hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; (3) tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan (4) partai politik baru, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual.



TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP DAPAT DIGUGAT DI PTUN



MK menegaskan kembali putusan perihal Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Artinya, Putusan DKPP wajib dilaksanakan atau ditindaklanjuti. Adapun keputusan lembaga yang menindaklanjuti putusan DKPP dapat dijadikan objek gugatan oleh pihak yang tidak menerima putusan DKPP dimaksud dengan mengajukan gugatan ke pengadilan TUN. Terhadap putusan pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipatuhi dan menjadi putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini terdapat dalam Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 perihal pengujian Pasal 458 ayat (3) UU Pemilu.

MANTAN NAPI PSIKOTROPIKA MAJU PILKADA



MK dalam amar Putusan Nomor 2/PUU-XX/2022 mengabulkan sebagian permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) yang diajukan oleh Hardizal, mantan terpidana Psikotropika. MK menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana".



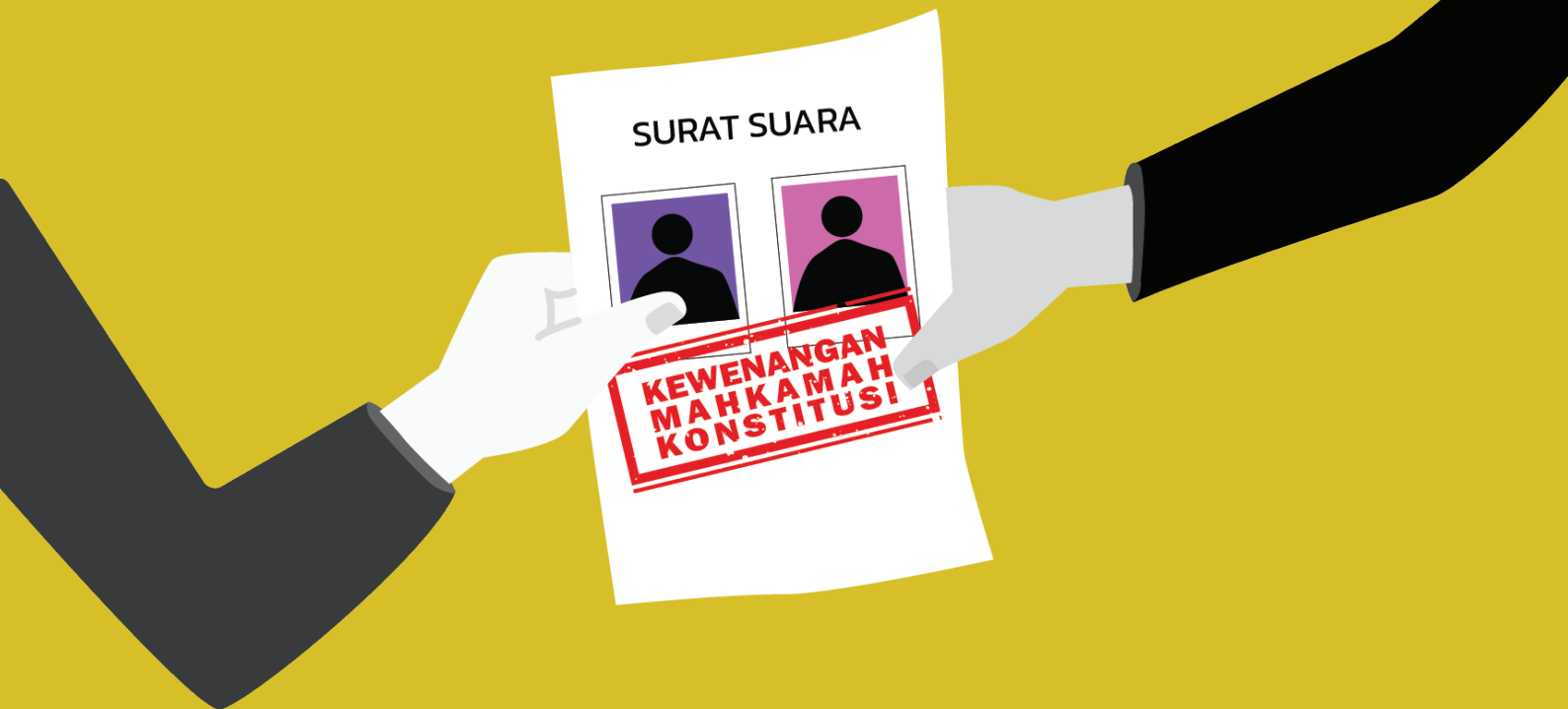


PENENTUAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI WEWENANG KPU

Penentuan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota diatur dalam Peraturan KPU. Demikian inti dari Putusan Nomor 80/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian materi UU Pemilu. Sebelumnya kewenangan tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden).



MEMUTUS SENGKETA HASIL PILKADA KEWENANGAN MK



Dalam amar Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 MK menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. MK juga menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hukum MK dalam putusan ini menegaskan bahwa pilkada adalah bagian dari pemilu. Konsekuensinya, memutus perselisihan hasil pilkada menjadi kewenangan MK.

GANJA UNTUK MEDIS PERLU RISET DAN KAJIAN



MK mendorong agar Pemerintah segera melakukan pengkajian dan penelitian terhadap jenis Narkotika Golongan I untuk dapat atau tidaknya dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Hasil pengkajian dan penelitian dapat digunakan untuk menentukan kebijakan, termasuk melalui perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang guna mengakomodir kebutuhan dapat atau tidaknya jenis Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Hal ini tertuang dalam Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian UU Narkotika.



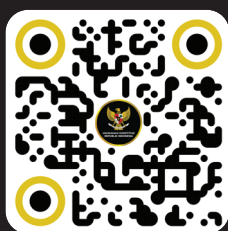
PERIODE JABATAN KETUA DAN WAKIL KETUA MK ADALAH SAMPAI DENGAN MASA JABATANNYA BERAKHIR



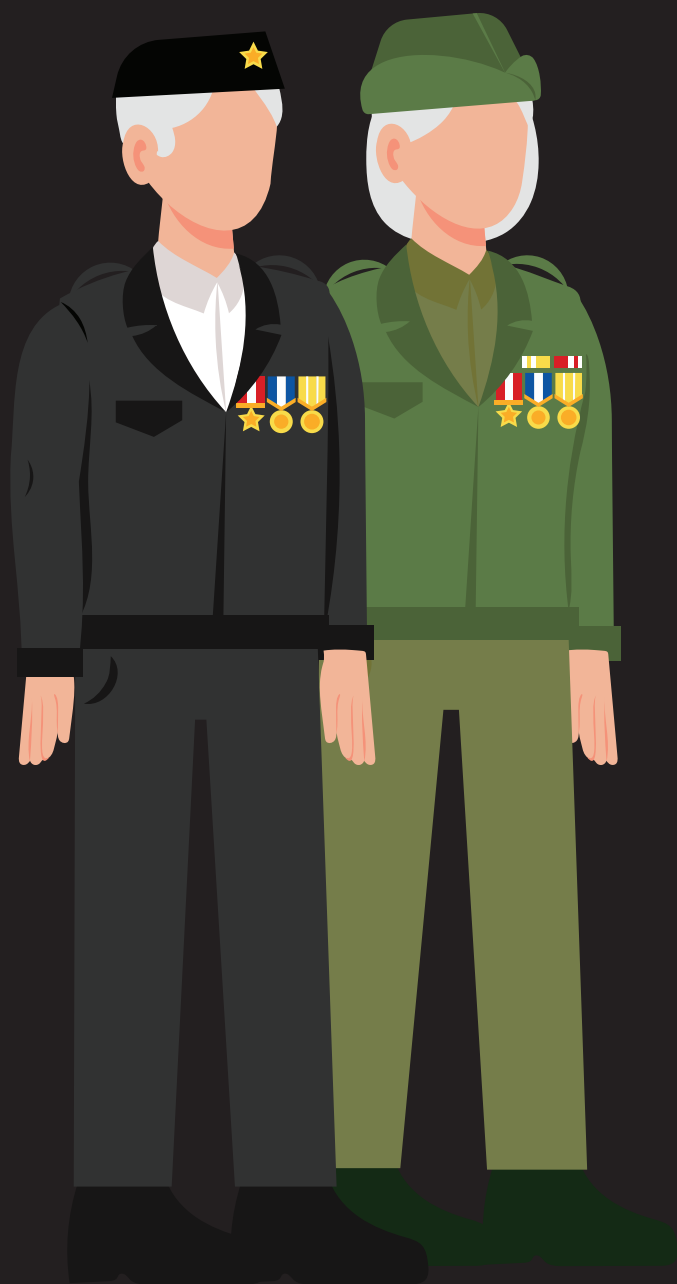
Dalam Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Priyanto. Dalam putusan tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 87 huruf a UU MK memunculkan kemenduaan makna (ambigu) karena adanya penggunaan frasa "masa jabatannya". Frasa "masa jabatan" yang disebutkan ternyata dipergunakan dalam dua arti/konteks, yaitu masa jabatan sebagai Hakim Konstitusi dan masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak adanya penegasan arti/konteks "masa jabatan" mana yang diacu oleh Pasal 87 huruf a UU MK telah menciptakan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusan tersebut, MK juga mempertimbangkan mengenai uji materiil Pasal 87 huruf b juncto Pasal 15 UU MK. Mahkamah tidak menemukan adanya cacat kehendak atau cacat intensi terkait ketentuan *a quo* yang dapat mengakibatkan ketentuan *a quo* melanggar UUD 1945. Menurut Mahkamah, jika merujuk pada keterangan pembentuk undang-undang, hakim konstitusi yang berusia kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat UU MK diundangkan tetap diinginkan pembentuk undang-undang untuk tetap menjabat sebagai hakim konstitusi karena secara usia hakim konstitusi bersangkutan telah memenuhi syarat usia berdasarkan undang-undang lama yang menjadi dasar ketika yang bersangkutan diangkat.





BATAS USIA PENSIUN PRAJURIT TNI KONSTITUSIONAL



Aturan mengenai batas usia prajurit pensiun TNI, yakni bagi prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama konstitusional. Hal ini ditegaskan oleh MK dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021. Permohonan yang diajukan oleh sejumlah pensiunan Anggota TNI mendalilkan bahwa Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon juga mendalilkan batas usia pensiun TNI perlu disetarakan dengan batas usia pensiun Polri. Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review. Namun demikian, meskipun penentuan batas usia pensiun TNI merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.

PEMOTONGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH KARENA PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK



Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diadakan pada November 2024 mendatang dinilai Bartolomeus Mirip dan Makbul Mubarak sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945. Penerapan norma tersebut mengakibatkan penyesuaian tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional terdapat beberapa daerah yang waktu penyelenggaraan Pilkadanya diundur dan terdapat pula beberapa daerah yang waktu penyelenggaraan Pilkadanya dimajukan. Mahkamah menilai dalam konteks masa peralihan yang demikian, tidak dapat dihindari dampak adanya penundaan atas pemenuhan hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam Pilkada. Namun demikian, Mahkamah menilai penundaan atas pemenuhan hak warga negara dimaksud tidak berarti menghilangkan hak warga negara tersebut dan telah sesuai dengan konsep pembatasan hak yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Untuk itu, MK menolak permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 67/PUU-XIX/2021 tersebut.





UJI FORMIL UU IBU KOTA NEGARA

Pengujian secara formil UU IKN yang diajukan oleh Abdullah Hehamahua, dkk., ditolak untuk seluruhnya oleh MK. Dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022, MK mempertimbangkan bahwa perencanaan pembentukan IKN merupakan bagian dari program sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah tercantum dalam Lampiran Perpres 18/2020. Selain itu, perencanaan pembentukan IKN telah pula dituangkan dalam Prolegnas jangka menengah 2020- 2024 dan telah diprioritaskan setiap tahunnya sejak tahun 2020 sehingga semakin menegaskan bahwa pembentukan IKN telah benar-benar memiliki kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011.



UJI ATURAN PENCATATAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN (PERNIKAHAN BEDA AGAMA)



MK tidak dapat menerima permohonan uji materiil aturan mengenai pencatatan oleh pengadilan bagi pernikahan beda agama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Dalam Putusan Nomor 71/PUU-XX/2022, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mampu menguraikan secara spesifik, aktual, maupun potensial hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Terlebih lagi, dalam permohonan para Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian.





PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JALAN YANG MULTITAFSIR

Penyelenggara jalan sebagaimana diatur dalam UU LLAJ dinilai multitafsir oleh seorang wartawan bernama Irfan Kamil. Bermula dari kasus konkret mengenai rusaknya jalan tanpa ada perbaikan, ia menguji frasa “penyelenggara jalan” dalam Pasal 273 ayat (1) UU LLAJ. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 98/PUU-XX/2022, MK menilai terhadap persoalan yang didalilkan Pemohon mengenai siapakah yang dimaksud penyelenggara jalan dalam Pasal 273 ayat (1) UU LLAJ, meskipun tidak dapat dirujuk langsung dalam Penjelasan Pasal a quo maupun dalam ketentuan umum, namun dari ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan dalam UU 22/2009 maka pengaturan mengenai penyelenggara jalan telah diakomodasi dengan jelas. Oleh karena itu, MK menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



JEJAK KONSTITUSI

Diagram Jejak Konstitusi berikut ini menunjukkan secara kronologik waktu dan momentum MK menggelar sidang pleno pengucapan putusan sejak Januari sampai dengan Desember 2022.

JANUARI



18 Januari 2022

- Perkara Nomor 69/PUU-XIX/2021 tentang uji materiil UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditarik Kembali.
- Perkara PHP Bupati Yalimo Nomor 152-153/PHPU.BUP-XIX/2021 diputus dengan amar MK tidak berwenang.

25 Januari 2022

- Perkara Nomor 60/PUU-XIX/2021 tentang uji materiil UU Polri ditolak seluruhnya.
- Dua perkara tidak dapat diterima, yakni Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 tentang uji materiil UU Kejaksaan tidak dapat diterima dan Perkara Nomor 64/PUU-XIX/2021 tentang uji materiil UU Cipta Kerja.



FEBRUARI

24 Februari 2022

- Perkara Nomor 71/PUU-XIX/2021 tentang uji materiil UU KUHP dan UU Jaminan Fidusia dikabulkan sebagian.
- Tujuh perkara uji materiil UU Pemilu tidak dapat diterima, yakni Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021, 68/PUU-XIX/2021, 70/PUU-XIX/2021, 1/PUU-XX/2022, 5/PUU-XX/2022, 6/PUU-XX/2022, dan 7/PUU-XX/2022.

MARET



29 Maret 2022

- Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 tentang uji materiil UU Pemilu dikabulkan sebagian.
- Tiga perkara ditarik kembali, yakni Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Kejaksaan; Perkara Nomor 16/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu; Perkara Nomor 17/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Ketenagakerjaan; Perkara Nomor 26/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu.
- Lima perkara tidak dapat diterima, yakni Perkara PHP Bupati Yalimo Nomor 145/PHPU.BUP-XIX/2021; Perkara Nomor 8/PUU-XX/2022 dan 11/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu; Perkara Nomor 10/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Cipta Kerja; dan Perkara Nomor 12/PUU-XX/2022 Tentang UU Bendera, Bahasa dan Lambang Negara.
- Dua perkara ditolak untuk seluruhnya, yakni Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 tentang uji materiil UU Guru dan Dosen dan Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang uji materiil UU TNI.

APRIL

20 April 2022



- Tujuh perkara ditolak untuk seluruhnya, yakni Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021, 15/PUU-XX/2022, 18/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU PILKADA. Kemudian Perkara Nomor 4/PUU-XX/2022 tentang KUHP; Perkara Nomor 13/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu; Perkara Nomor 22/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Perlindungan Konsumen.
- Lima perkara tidak dapat diterima, yakni Perkara Nomor 3/PUU-XX/2022 tentang uji UU Desa; Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022 dan 21/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu; Perkara Nomor 14/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Kejaksaan.

JULI

7 Juli 2022



- Empat perkara ditolak untuk seluruhnya, yakni Perkara Nomor 33/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Cipta Kerja, serta Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022; 57/PUU-XX/2022; dan 44/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu.
- Empat perkara tidak dapat diterima, yakni Perkara Nomor 19/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Perkara Nomor 37/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pilkada; Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu; serta Perkara Nomor 63/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Sulawesi Utara.



20 Juli 2022

- Lima perkara ditolak seluruhnya, yakni tiga perkara uji materiil UU IKN (Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022; 34/PUU-XX/2022; dan 49/PUU-XX/2022). Kemudian Perkara Nomor 36/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UUITE dan 106/PUU-XVIII/2020 tentang uji UU Narkotika.
- Dua perkara ditarik kembali, yakni Perkara Nomor 65/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Sistem Pendidikan Nasional dan Perkara Nomor 66/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU IKN.

MEI

31 Mei 2022



- Dua perkara dikabulkan sebagian, yakni Perkara Nomor 2/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pilkada dan Perkara Nomor 31/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemda.
- Enam perkara uji materiil UU IKN tidak dapat diterima, yakni Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022; 40/PUU-XX/2022; 47/PUU-XX/2022; 48/PUU-XX/2022; 53/PUU-XX/2022; dan 54/PUU-XX/2022. Selain itu, tiga perkara lainnya tidak dapat diterima, yakni Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Penghapusan KDRT; Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu; dan Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Merek dan Indikasi Geografis.
- Tiga perkara ditarik kembali, yakni Perkara Nomor 45/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Administrasi Pemerintahan; Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pilkada.



JUNI

20 Juni 2022

- Dua uji materiil UU MK dikabulkan sebagian, yakni Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dan 56/PUU-XX/2022. Selain itu, perkara uji materiil UU HAM dengan Nomor 30/PUU-XX/2022 dikabulkan sebagian.
- Dua putusan uji materiil UU MK ditolak, yakni Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan 100/PUU-XVIII/2020.
- Perkara uji materiil UU BPK dengan Nomor 29/PUU-XX/2022 tidak dapat diterima.

AGUSTUS

31 Agustus 2022



- Tiga perkara ditolak untuk seluruhnya, yakni Perkara Nomor 38/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Kepailitan; Perkara Nomor 38/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pers; Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 tentang uji materiil UU Perbankan Syariah; dan Perkara Nomor 64/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu.
- Tiga perkara tidak dapat diterima, yakni dua perkara tentang uji materiil UU Otsus Papua (Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022 dan 43/PUU-XX/2022 XX/2022) serta Perkara Nomor 67/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Cipta Kerja.
- Perkara uji materiil UU Pemilu dengan Nomor 74/PUU-XX/2022 ditarik kembali.

SEPTEMBER

29 September 2022



- Dua perkara dikabulkan sebagian, yakni Perkara Nomor 37/PUU-XX/2021 tentang uji materiil UU Cipta Kerja dan Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pilkada.
- Lima perkara ditolak untuk seluruhnya, yakni Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Kalsel; Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 dan 78/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu serta Perkara Nomor 84/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Cipta Kerja.
- Lima perkara tidak dapat diterima, yakni Perkara Nomor 71/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Adminduk; Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU MK; Perkara Nomor 76/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Cipta Kerja; Perkara Nomor 77/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Guru dan Dosen; dan Perkara Nomor 83/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Perlindungan Anak.
- Dua perkara ditarik kembali, yakni Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Kalsel dan Perkara Nomor 81/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Ombudsman.
- Perkara Nomor 79/PUU-XX/2022 terkait dengan uji materiil UU Advokat dinyatakan gugur.

30 November 2022



- Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu dikabulkan sebagian.
- Empat perkara ditolak untuk seluruhnya, yakni Perkara Nomor 63/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Hak Cipta; Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 tentang uji materiil KUHP; Perkara Nomor 98/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UULLAJ; dan Perkara Nomor 100/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UUSBSN.

DESEMBER

20 Desember 2022



- Dua perkara dikabulkan sebagian, yakni Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Kejaksaan dan Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu.
- Empat perkara ditolak untuk seluruhnya, yakni Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU P3; Perkara Nomor 96/PUU-XX/2022 tentang uji materiil KUHP; Perkara Nomor 106/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Kesehatan, dan Perkara Nomor 107/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU MA.
- Perkara Nomor 113/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Perlindungan Anak ditarik kembali.
- Perkara Nomor 104/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Polri tidak dapat diterima.

OKTOBER

31 Oktober 2022



- Tiga perkara dikabulkan sebagian, yakni Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022 tentang uji materiil KUHP; Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu; dan Perkara Nomor 91/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Advokat.
- Enam perkara ditolak untuk seluruhnya, yakni Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU PSDN; Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Perbankan Syariah; Perkara Nomor 51/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Perdagangan; Perkara Nomor 62/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Rusun; Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UUP3 dan Perkara Nomor 88/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Keterbukaan Informasi Publik.
- Empat perkara ditarik kembali, yakni Perkara Nomor 90/PUU-XX/2022 Tentang uji materiil UU Cipta Kerja; Perkara Nomor 92/PUU-XX/2022 tentang Pembentukan Papua Selatan; Perkara Nomor 94/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Hak Keuangan Pejabat; dan Perkara Nomor 99/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Otsus Papua.



NOVEMBER

23 November 2022

- Dua perkara ditolak untuk seluruhnya, yakni, Perkara Nomor 95/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pilkada dan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU MK.
- Tiga perkara tidak dapat diterima, yakni Perkara Nomor 101/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Pemilu; Perkara Nomor 97/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Sumsel; dan Perkara Nomor 102/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Desa.

2023

MEMPERKUAT **INTEGRITAS** PERADILAN KONSTITUSI



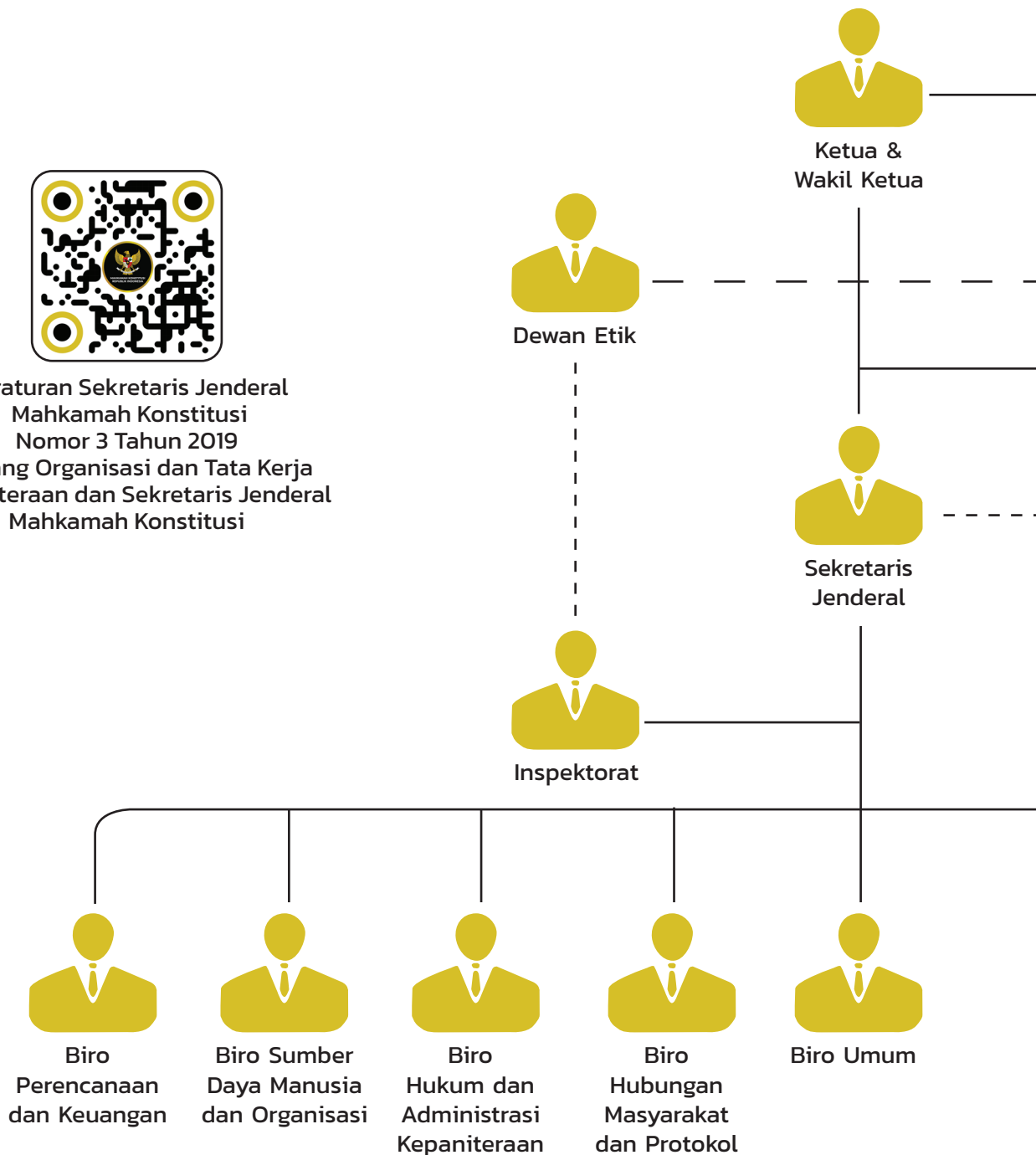


Integritas dimaknai sebagai konsistensi berpikir, berkata, serta berperilaku dan bertindak sesuai hati nurani, kebaikan dan kebenaran. Nilai integritas ini yang dari waktu ke waktu ditradisikan dan dikembangkan untuk memperkuat MK sebagai peradilan konstitusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 UU Mahkamah Konstitusi, MK bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan *mindset* integritas, seluruh sumber daya dioptimalkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan dan kinerja MK.

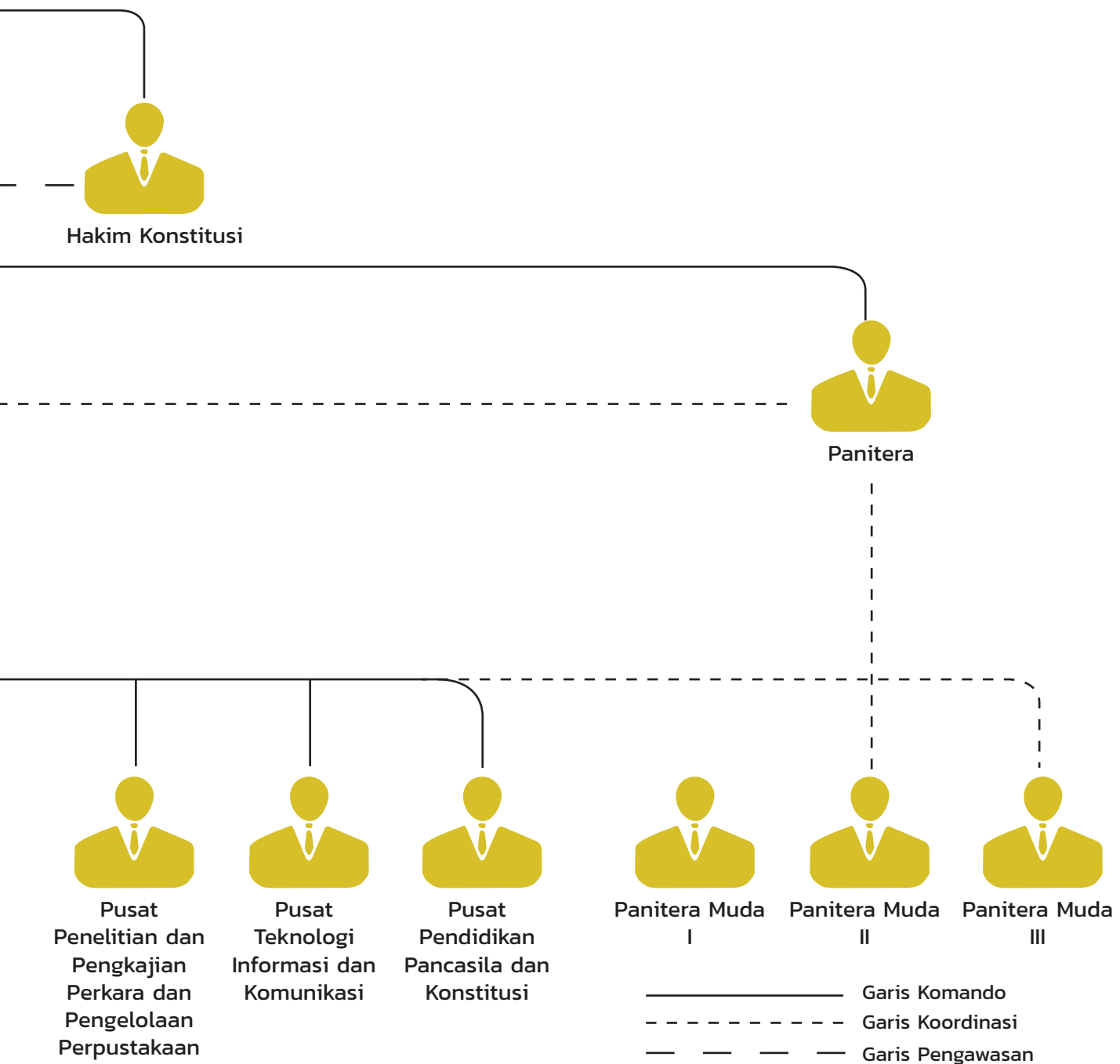
STRUKTUR KEPANITERAAN DAN MAHKAMAH



Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi



ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KONSTITUSI



DUKUNGAN SDM

SDM merupakan motor penggerak utama bagi pencapaian visi dan misi MK. Untuk itu, upaya menyediakan dukungan SDM yang berkualitas dengan jumlah yang proporsional sesuai dengan kebutuhan senantiasa menjadi perhatian utama.

JUMLAH PEGAWAI

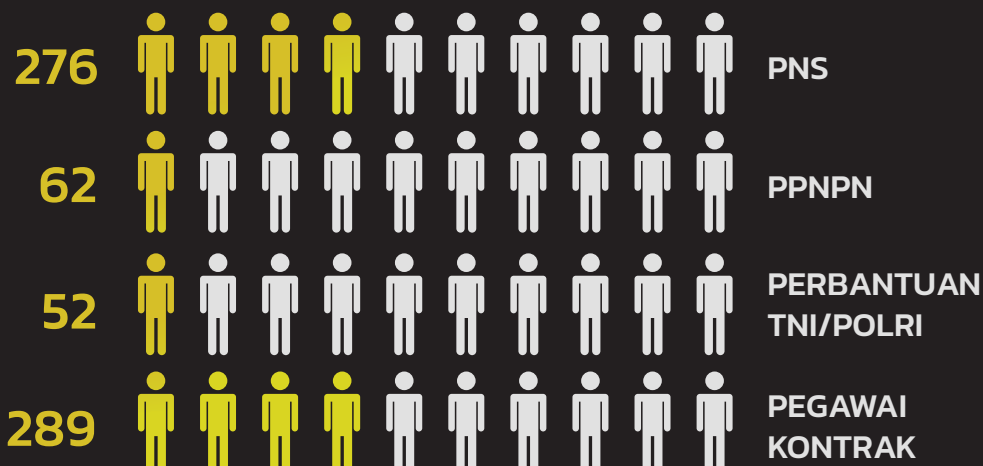
679

BERDASARKAN UNIT KERJA



Sekretaris Jenderal	-
Panitera	1
Penugasan di Luar MK	3
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	76 Orang
Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	59 Orang
Biro Perencanaan dan Keuangan	27 Orang
Biro Umum	367 Orang
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	33 Orang
Inspektorat	12 Orang
Kepaniteraan	21 Orang
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	16 Orang
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	38 Orang
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	26 Orang

BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

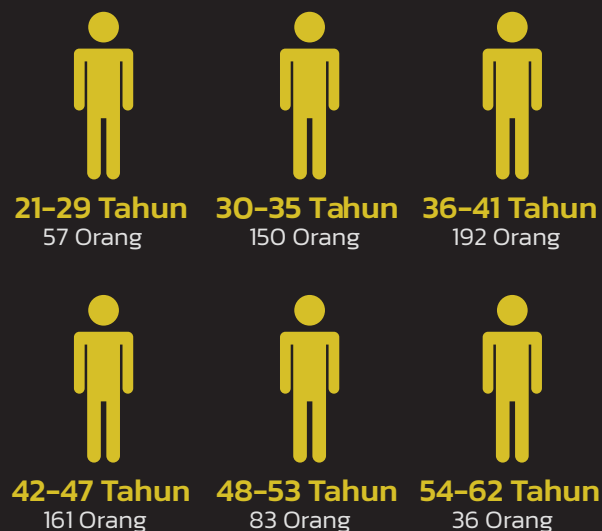


BERKUALITAS

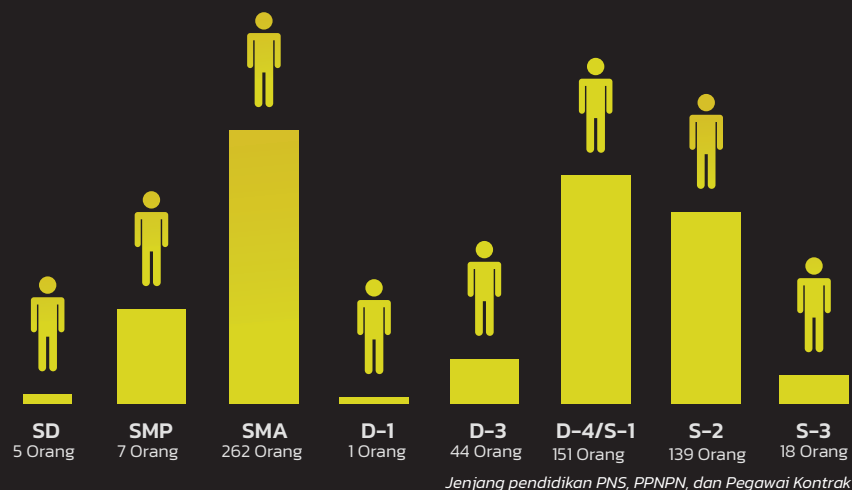
BERDASARKAN JENIS KELAMIN



BERDASARKAN USIA

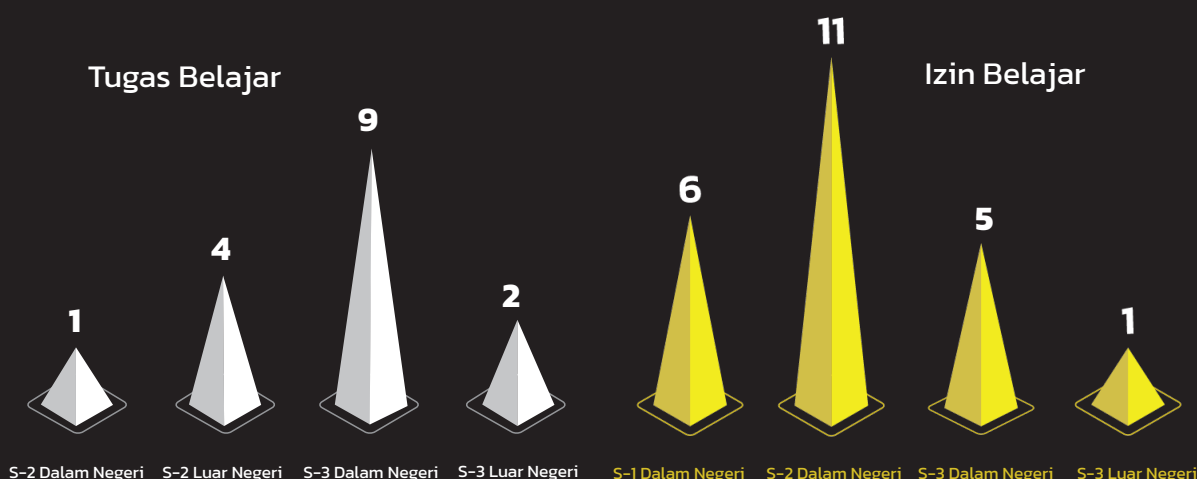


BERDASARKAN PENDIDIKAN



Rintisan Gelar

Bentuk optimalisasi kompetensi sumber daya yang ada pada lembaga, MK pada 2022 ini mengirim sejumlah pegawai dengan status Tugas Belajar dan Izin Belajar, baik di dalam maupun di luar negeri. Dari 39 pegawai yang mengikuti Rintisan Gelar, sebanyak 8 orang pegawai memulai studi (1 orang S-1; 6 orang S-2; 1 orang S-3) ; 5 orang lulus (2 orang S-2; 3 orang S-3); 7 orang menunggu wisuda (1 orang S-1; 6 orang S-2); 18 orang masih dalam proses studi (4 orang S-1; 2 orang S-2; 12 orang S-3); serta 1 orang tidak selesai S-3.



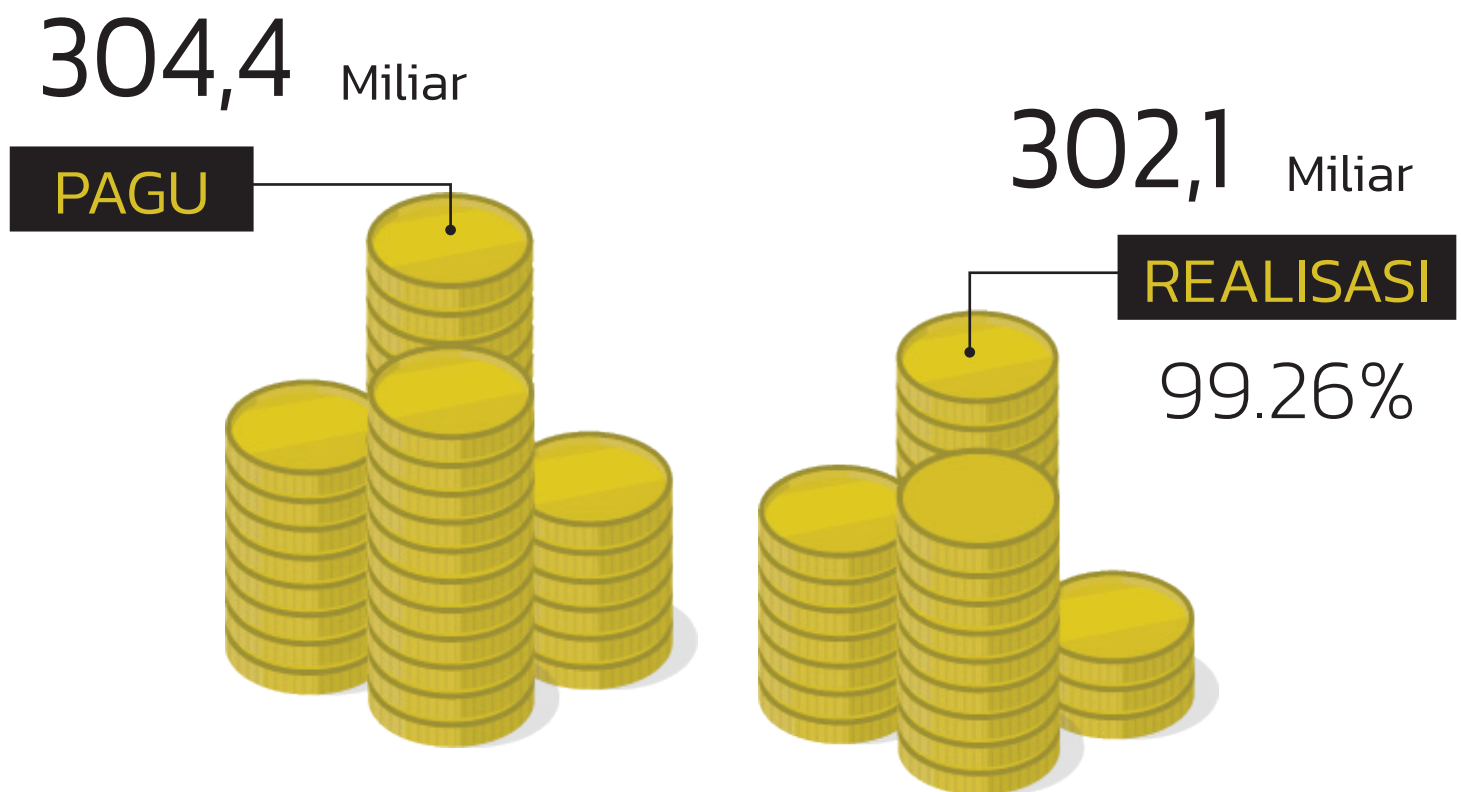
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 391 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti beralih menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI)



TRANSPARAN KELOLA ANGGARAN

Profesional semata belum cukup, karena transparan juga sangat diperlukan, terlebih menyangkut keuangan negara. Untuk itu, dalam penggunaan anggaran negara, MK menjaga tradisi untuk selalu transparan dan akuntabel. Pergerakan dinamis penggunaan dan penyerapan anggaran per bulan secara real time dapat diakses di mkri.id.



Belanja Pegawai

57,7 Miliar

99.28%



Belanja Barang

236,7 Miliar

99,23%



Belanja Modal

7,6 Miliar

99,9%

PENGAWASAN INTERNAL PERKUAT KINERJA

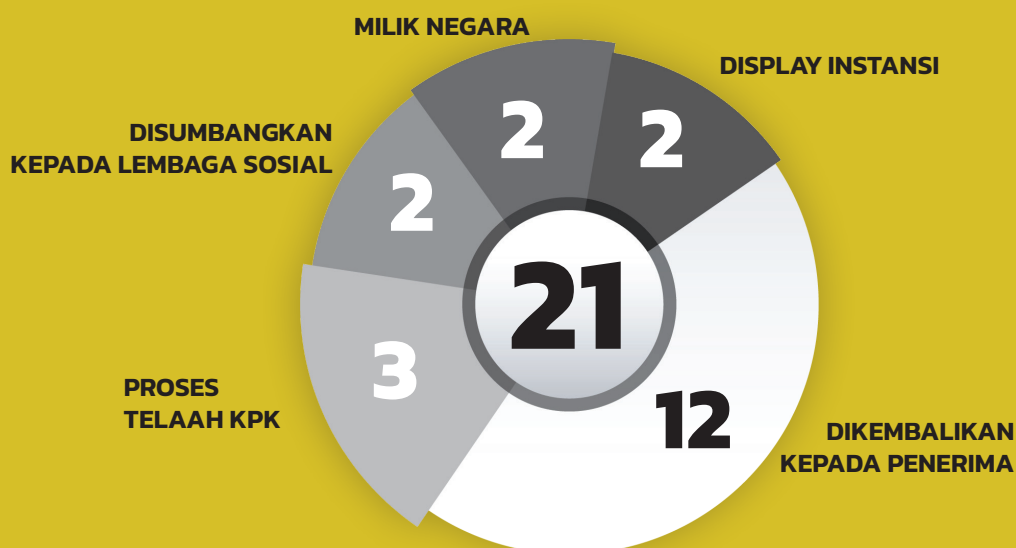
PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Di tengah kultur untuk menjaga integritas personal dan kelembagaan, pemberian yang ditengarai atau potensial menjadi gratifikasi, baik kepada Hakim Konstitusi maupun pegawai, dikelola sedemikian rupa. Tahun 2022, terdapat 21 laporan gratifikasi.

JUMLAH PENERIMAAN GRATIFIKASI



STATUS GRATIFIKASI



CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

Hakikat reformasi birokrasi ialah pembaharuan dan perubahan mendasar pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pada 2022, capaian Indeks Reformasi Birokrasi MK Tahun 2021 berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berhasil naik.

Target: 78

Realisasi: 76,06

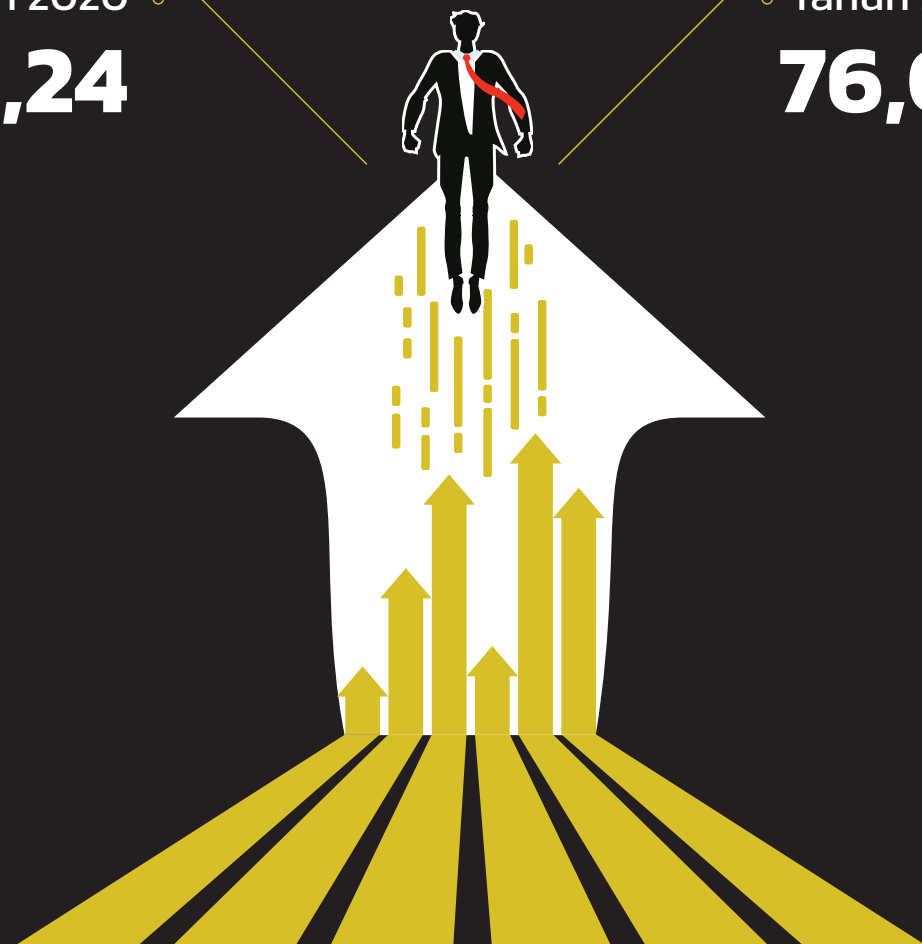
Capaian: 97,51%

Tahun 2020

75,24

Tahun 2021

76,06



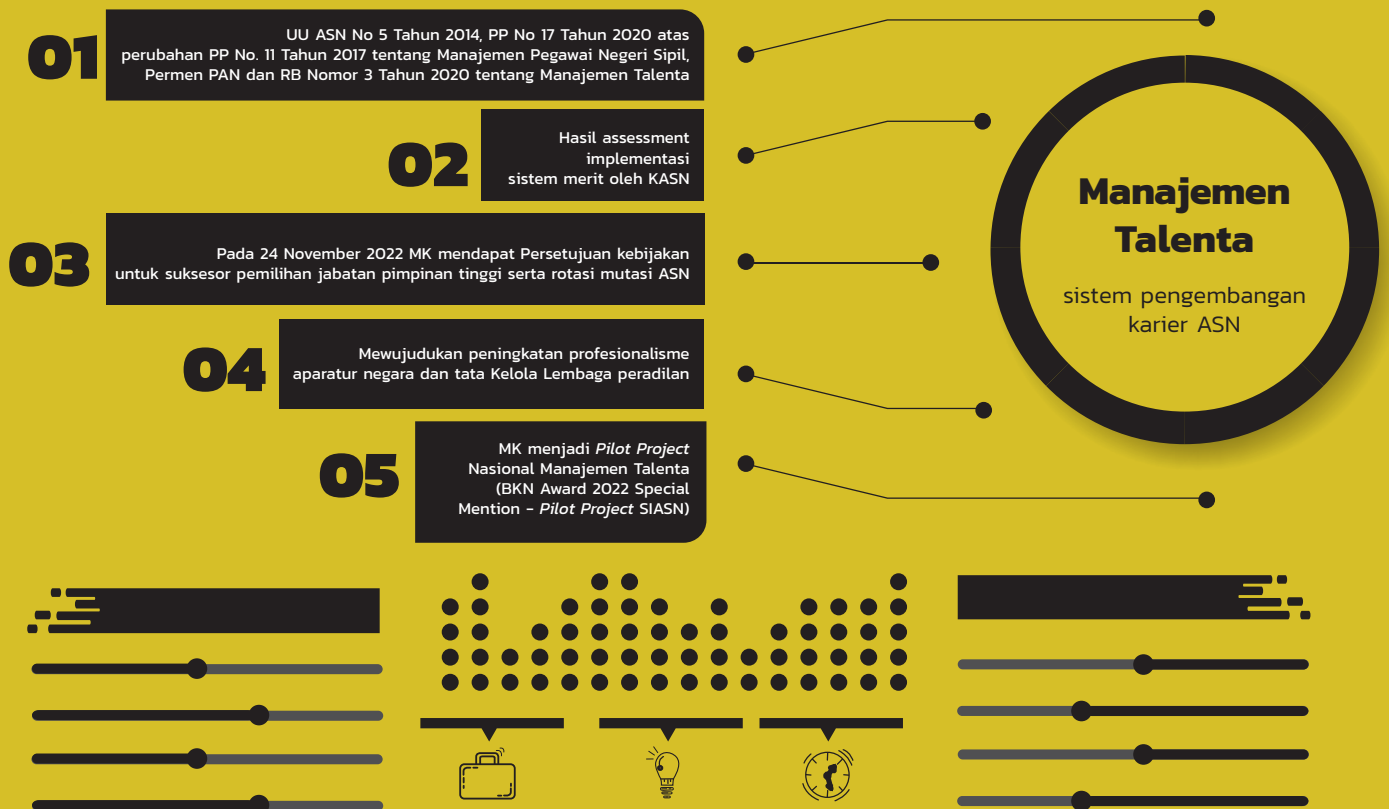
LANGKAH MENUJU ZONA INTEGRITAS

Setelah pada 2021, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dinyatakan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK), tahun ini melangkah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menyusul berikutnya, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mengajukan sebagai WBK. Tahun ini, kedua unit kerja dinyatakan lulus administrasi.



PILOT PROJECT NASIONAL MANAJEMEN TALENTA

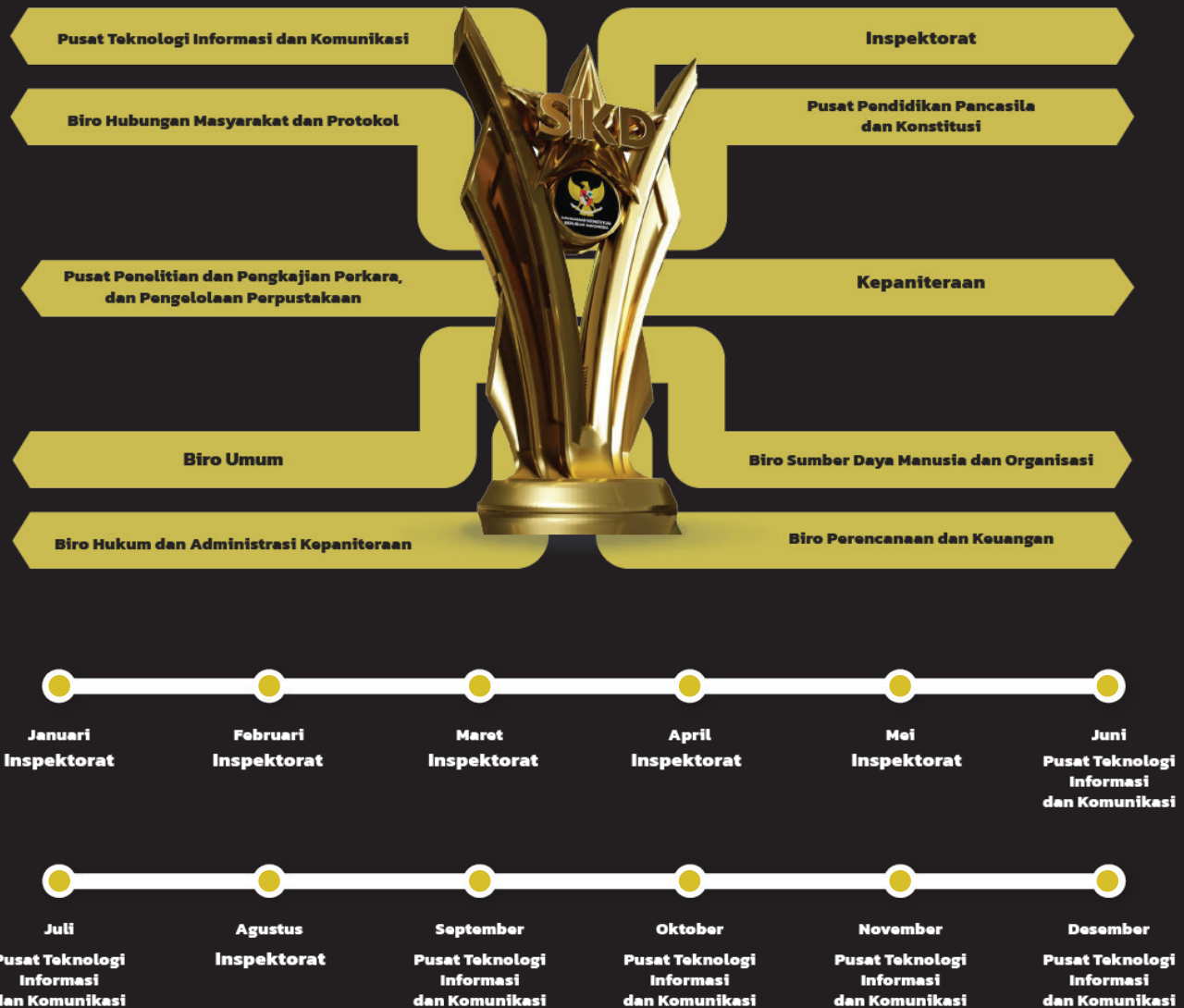
Untuk mencari, mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia aparatur terbaik yang disiapkan sebagai pemimpin masa depan untuk mendukung pencapaian visi dan misi, MK telah menerapkan Manajemen Talenta. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjuk MK menjadi *pilot project* nasional Manajemen Talenta.



SIKD AWARD

APRESIASI DAN KOMPETISI KINERJA

Kompetisi secara sehat diperlukan untuk menumbuhkan daya saing dan menunjukkan keunggulan. Di MK, respon terhadap Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dikompetisikan antar unit kerja agar kerja-kerja tim dapat dikembangkan. SIKD Award diberikan secara bergilir kepada unit kerja dengan respons tertinggi pada setiap akhir bulan.



MELANJUTKAN INOVASI TEKNOLOGI PERADILAN MODERN

Dalam kerangka cita-cita mewujudkan peradilan modern, MK terus melanjutkan inovasi dan optimalisasi teknologi untuk memberikan dukungan bagi kelancaran aktivitas, baik persidangan maupun non-persidangan. Mulai dari pengembangan aplikasi SIMANTAP untuk manajemen talenta sumber daya manusia MK, ruang tanya jawab (*room chat*) untuk pencari keadilan, pencegahan dan keamanan siber melalui CSIRT, dan *text to speech* agar laman MK lebih ramah disabilitas.

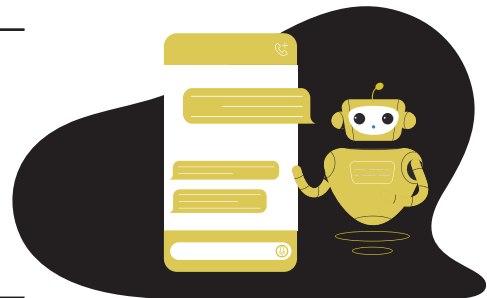


APLIKASI BERITA NEGARA

Aplikasi yang bertujuan untuk menyampaikan salinan putusan yang amarnya dikabulkan dan mempermudah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pembuatan lembaran lepas berita negara.

ROOM CHAT

Aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana tanya jawab, konsultasi perkara, dan informasi seputar MK, dapat diakses di *mkri.id*.



TEXT TO SPEECH

Fitur suara yang berfungsi membantu para pencari keadilan penyandang disabilitas penglihatan untuk mengakses berbagai informasi seputar MK di *mkri.id*.

CSIRT-MK

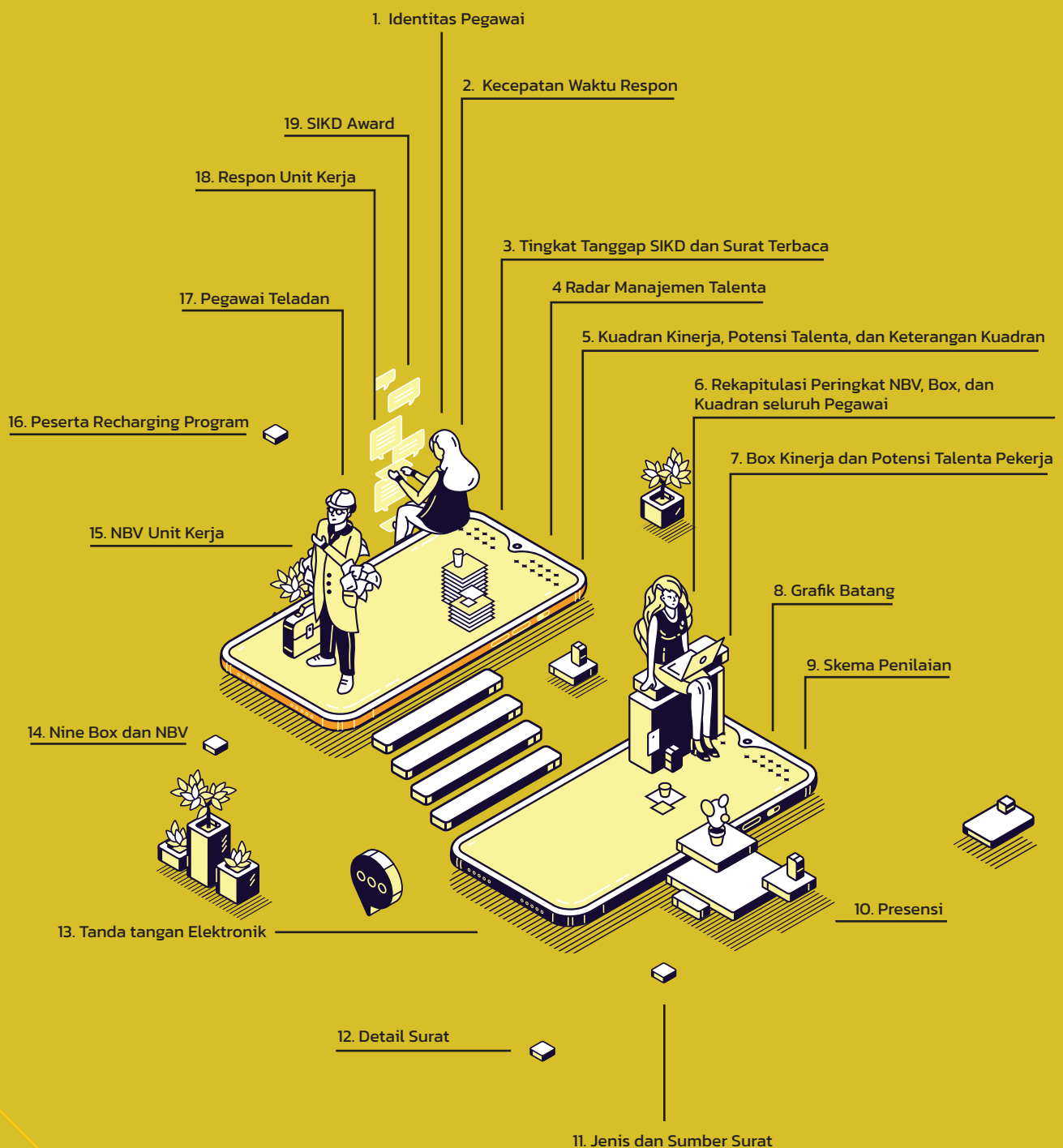
Computer Security Incident Response Team (CSIRT-MK) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersiaga dalam pendeteksian serangan, analisis risiko keamanan siber, dan konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden siber.



MANAJEMEN TALENTA

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI

Untuk mendapatkan penilaian yang tepat terhadap pegawai, MK menggunakan Sistem Informasi Manajemen Talenta Pegawai (SIMANTAP). Hasil penilaian berfungsi untuk melihat dan menilai kemampuan pegawai sekaligus menjadi *screening* awal pada saat proses penempatan pegawai berdasarkan potensi yang dimiliki untuk ditempatkan di posisi yang tepat. Penilaian pegawai tersebut meliputi 19 indikator yang terurai dalam infografis berikut.



ARSIP

Sejak 2006 - 2022, MK rutin menyerahkan arsip statis kepada Arsip Nasional RI sebanyak 21 kali. Selama 2022 telah diserahkan sejumlah 76 boks Arsip Perkara Pengujian Undang-Undang dan 8 boks arsip Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/Daerah.



PENGHARGAAN CERMIN KEPERCAYAAN

PENGHARGAAN PUBLIK KEPADA MK



Penghargaan
dari Venice Commission
atas suksesnya kegiatan
Kongres kelima WCCJ



Penghargaan
BKN Award 2022
Special Mention –
Pilot Project SIASN



Penghargaan
BKN Award 2022
Implementasi Manajemen
ASN Terbaik



Penghargaan
BKN Award 2022
Implementasi Penerapan
Manajemen Kinerja



Penghargaan
BKN Award 2022 Penerapan
Pemanfaatan Data-Sistem
Informasi dan CAT



Penghargaan
Peringkat Kesembilan
Kinerja Anggaran
Tahun Anggaran 2021
Nilai 95,36 dan Predikat Sangat Baik



Penghargaan
Satuan Kerja dengan Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Terbaik III Pagu 100-500 Miliar



Penghargaan
Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik
Kategori Sangat Baik



Penghargaan
dari Wajib Pajak Pemungut
dengan Kontribusi Pembayaran
Pajak Terbesar ke -11



Laporan Keuangan dengan
Opini WTP



Anugerah Komisi Informasi Publik
sebagai Badan Publik Informatif 92,96



Penghargaan Hasil Pengawasan
Kearsipan kepada Mahkamah Konstitusi
dengan kategori "AA" (Sangat
Memuaskan) dengan nilai sebesar 91.70

Penghargaan bukan tujuan utama, walaupun tentu patut disyukuri sebagai bentuk apresiasi. Tahun 2022, MK menerima 11 penghargaan dari berbagai lembaga/instansi lain untuk berbagai kategori prestasi. Selain itu, MK memberikan penghargaan Anugerah Konstitusi kepada para mitra yang telah memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan visi, misi, dan kewenangan MK.

PENGHARGAAN KEPADA MITRA MK

Anugerah Konstitusi bagi Jurnalis Media Online

		
Terbaik I	Terbaik II	Terbaik III
Andi Saputra (detik.com)	Yustinus Paat (beritasatu.com)	Muhammad Zulfikar (antaranews.com)

Anugerah Konstitusi bagi Jurnalis Media Televisi

		
Terbaik I	Terbaik II	Terbaik III
Kompas TV	TV One	Inews TV

Anugerah Konstitusi bagi Jurnalis Media Cetak

		
Terbaik I	Terbaik II	Terbaik III
Mimi Kartika (Republika)	Indriyani Astuti (Media Indonesia)	Vendy Yhulia Susanto (Harian Kontan)

Anugerah Konstitusi bagi Pengelola Video Conference

		
Terbaik I	Terbaik II	Terbaik III
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



MENINGKATKAN KESADARAN **BERKONSTITUSI**



Sejalan dengan misi kedua MK, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, MK turut berkontribusi meningkatkan kesadaran warga negara dan penyelenggara negara dalam berkonstitusi.

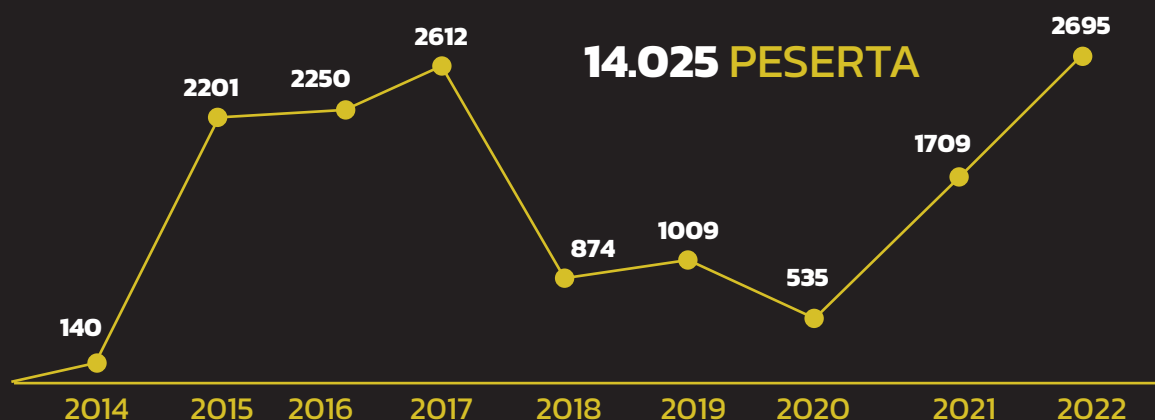
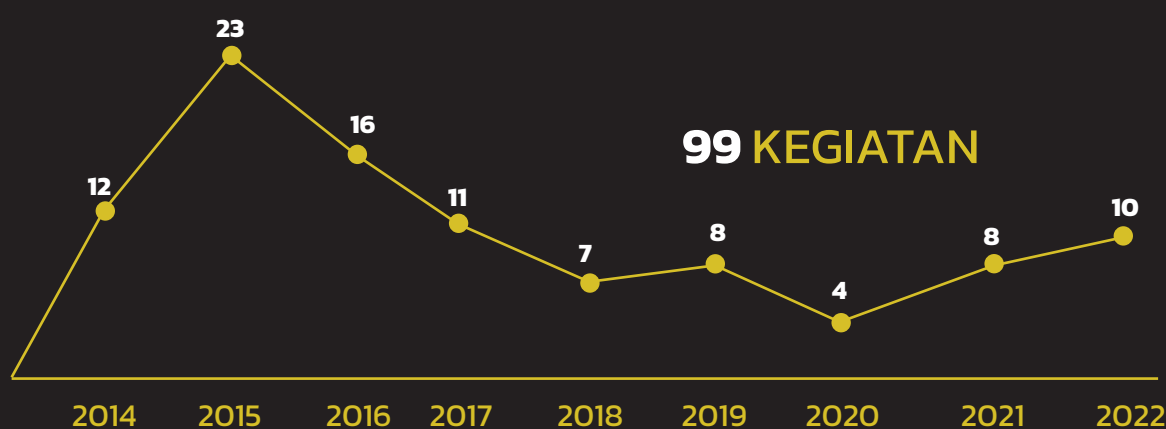
Tahun ini, program dan kegiatan peningkatan kesadaran berkonstitusi digelar untuk menggemakan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan kesadaran berkonstitusi melalui PPHKWN, Bimtek, Kerja Sama Dalam Negeri, Ngopi Bareng Courtizen, Festival Konstitusi dan Antikorupsi, Pengukuhan Desa Konstitusi, Lomba Pidato Konstitusi Antar-Lurah dan Kepala Desa se-Solo Raya, Ikon HKWN, dan Peluncuran Buku.



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Untuk menjalankan misi “Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara”, MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejak 2014, menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN).

PPHKWN 2014–2022





HALAQAH KONSTITUSI

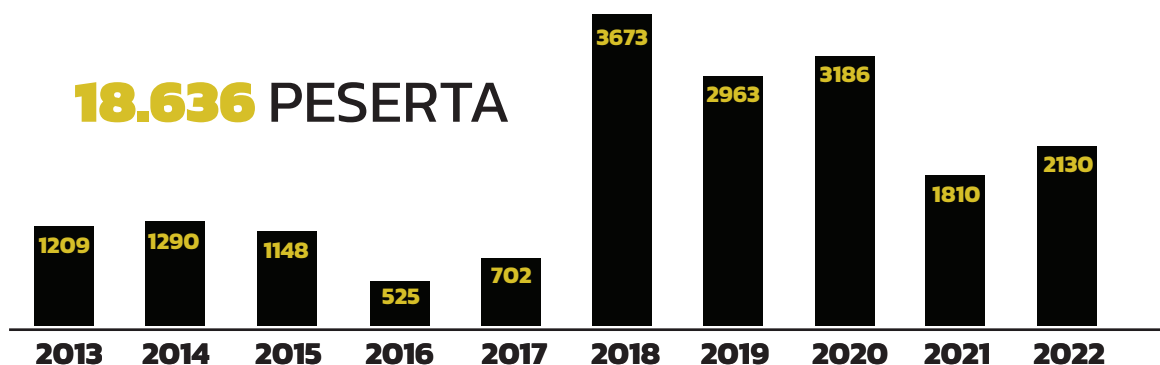
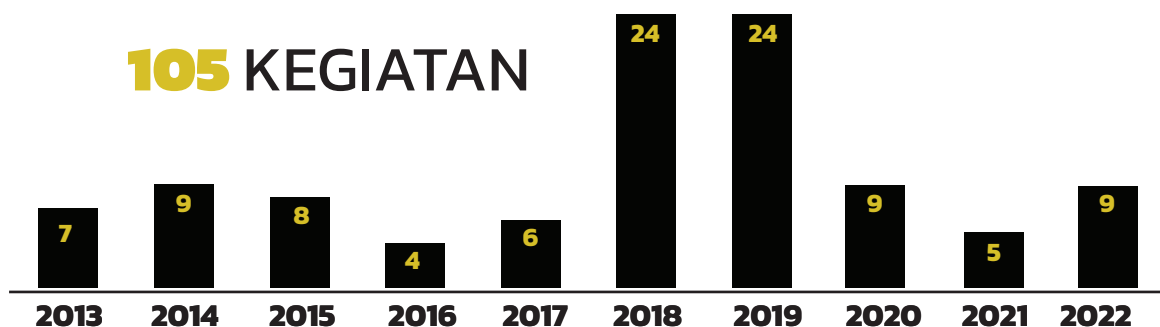
PPHKWN dalam format Halaqah Konstitusi digelar selama Bulan Ramadhan 1443 Hijriyah secara daring melalui *live streaming* di YouTube Mahkamah Konstitusi RI.



BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA

Agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan beracara dalam perkara konstitusi, MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejak 2013, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, baik PUU, SKLN, maupun PHPU

BIMTEK 2013–2022



BIMTEK 2022

9 KEGIATAN **2130** PESERTA

BIMTEK PUU

PESERTA

Analisis Hukum
Kementerian Hukum
dan HAM

Perhimpunan Advokat
Indonesia (PERADI)

Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum
Indonesia

4 KEGIATAN
1362 PESERTA

BIMTEK SKLN

PESERTA

Perhimpunan Advokat
Indonesia (PERADI)

1 KEGIATAN
400 PESERTA

BIMTEK PHPU

PESERTA

Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia

Ikatan Keluarga Alumni
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Korps Alumni Himpunan
Mahasiswa Islam

4 KEGIATAN
368 PESERTA

KERJA SAMA DENGAN



MITRA DALAM NEGERI

Guna menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman mengenai MK, Konstitusi, dan Pancasila, MK bekerja sama dengan perguruan tinggi dan institusi lainnya menggelar kuliah umum, seminar nasional, webinar, diskusi publik, bedah buku, pendidikan dan pelatihan, dan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA).



NGOPI BARENG COURTIZEN

MK menggelar acara “Ngopi Bareng Courtizen” pada 22 Juli 2022. Acara ini menjadi forum pertemuan dan diskusi MK dengan Courtizen (pengikut media sosial MK). Tujuannya untuk mendapatkan *insight* dari Courtizen dalam peningkatan kualitas pengelolaan media sosial MK. Hadir sebagai narasumber Hamdan Zoelva dan Tsamara Amany dengan *host* Cindy Systiarani.



LOMBA PIDATO KONSTITUSI ANTAR-LURAH DAN KEPALA DESA SE-SOLO RAYA

Pada 28 Juni 2022, MK bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta menggelar Lomba Pidato Konstitusi Antar-Lurah dan Kepala Desa se-Solo Raya. Proses perlombaan telah dimulai sejak 20 Mei 2022 melalui seleksi video pidato. Lomba diadakan dengan tujuan memberdayakan Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan kesadaran berkonstitusi dan mensosialisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi.

JUARA LOMBA

1 SUPARMANTO SM
Kepala Desa Slogoretno, Wonogiri

2 JALU SETIO BINTORO
Kepala Desa Popongan, Karanganyar

3 SUTRISNO
Lurah Kepatihan Wetan, Surakarta





FESTIVAL KONSTITUSI & ANTI KORUPSI 2022

Festival Konstitusi dan Antikorupsi Tahun 2022 digelar di Pontianak pada 11-12 November 2022 atas kerja sama MPR, MK, dan KPK dengan menggandeng Universitas Tanjungpura Pontianak. Mengusung tema “Pulih dan Kuat Bersama Berdasar Pancasila, Konstitusi, dan Semangat Antikorupsi”, serangkaian acara diselenggarakan antara lain kuliah umum, Pameran dan Bazaar Konstitusi, *Talk Show* Gen-Z, dan *Talk Show* yang menghadirkan pimpinan MPR, MK, KPK, dan Universitas Tanjungpura. Hadir sebagai bintang tamu Angelina Aqila (Miss Indonesia Kalimantan Barat 2022), Tissa Biani (aktris dan penyanyi), Kiki Saputri (komika), dan diiringi musik oleh T-Koes Band.



PENGUKUHAN **DESA MEKAR SARI** S E B A G A I **DESA KONSTITUSI**

Pengukuhan Desa Mekar Sari sebagai Desa Konstitusi, merupakan bagian dari apresiasi sekaligus ikhtiar MK untuk membangun *role model* dari perangkat terkecil dalam struktur pemerintahan negara dalam rangka tegaknya Pancasila dan Konstitusi.



Nagari Konstitusi
**NAGARI
PASIA
LAWEH**

2021

2022

Desa Konstitusi
MEKAR SARI

2018

Desa Konstitusi
BANGBANG

2012

Desa Konstitusi
GALESONG

2013

Kampung Konstitusi
KAMPUNG WASUR



66 IKON HKWN



**Sipil dan Politik
(41 ikon)**



**Ekonomi
(5 ikon)**



**Sosial
(13 ikon)**



**Budaya
(2 ikon)**



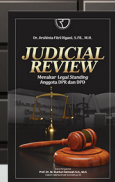
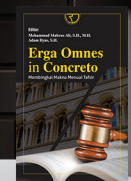
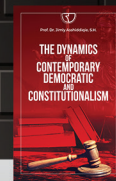
**Kelompok Rentan
(5 ikon)**

Pada Desember 2021, MK telah meluncurkan 66 ikon Hak Konstitusional Warga Negara yang terbagi atas tiga kelompok hak: hak individual, hak kolektif, dan hak masyarakat rentan. Peluncuran ikon merupakan hasil kerja sama MK dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) serta Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ).

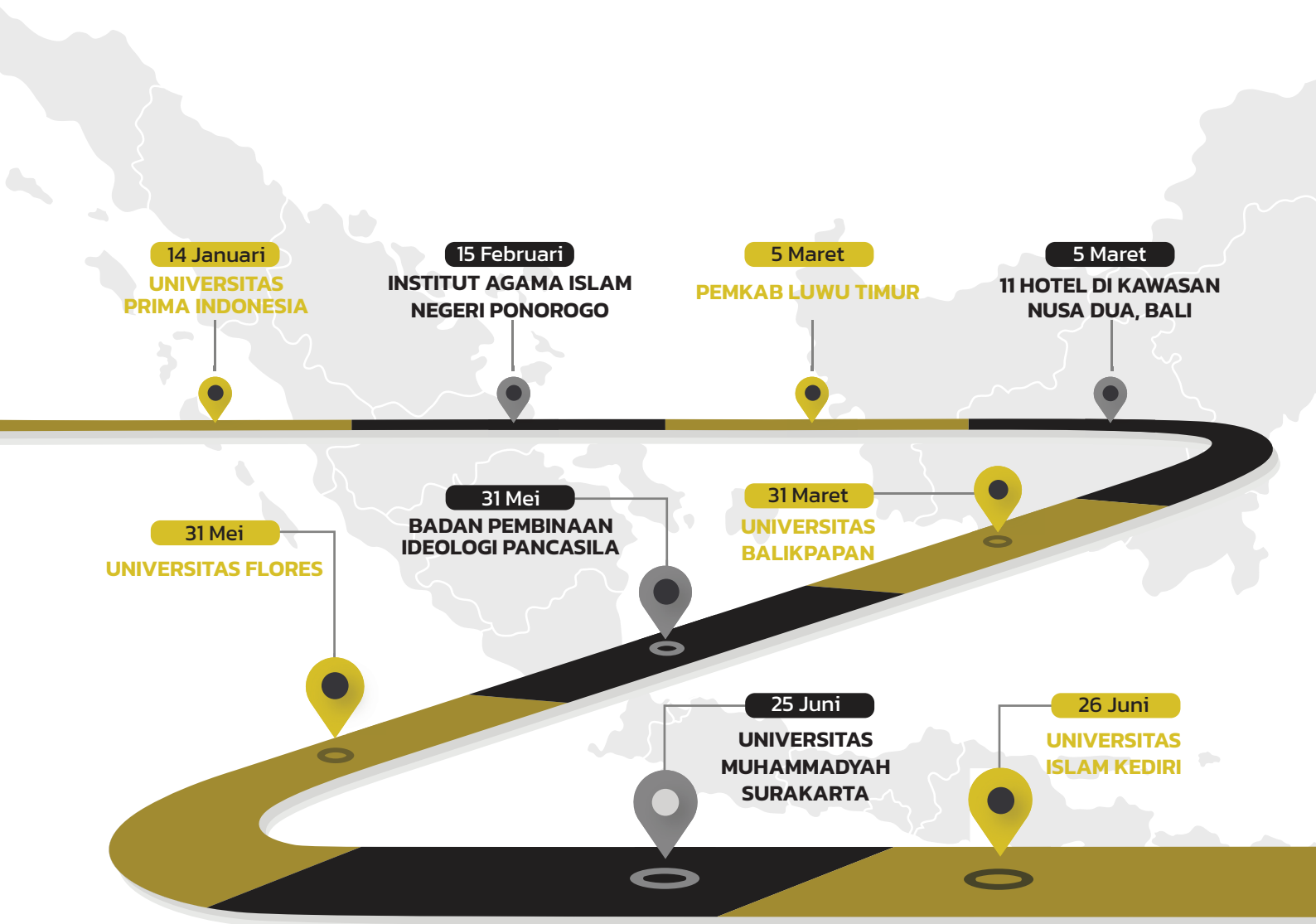


PELUNCURAN BUKU

Sejak berdiri pada 2003, MK memiliki tradisi akademik menuangkan gagasan dan pemikiran ke dalam karya tulis ilmiah berbentuk buku. Pada Desember 2022, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-19, MK menggelar Peluncuran 33 Buku dan Bedah Buku.

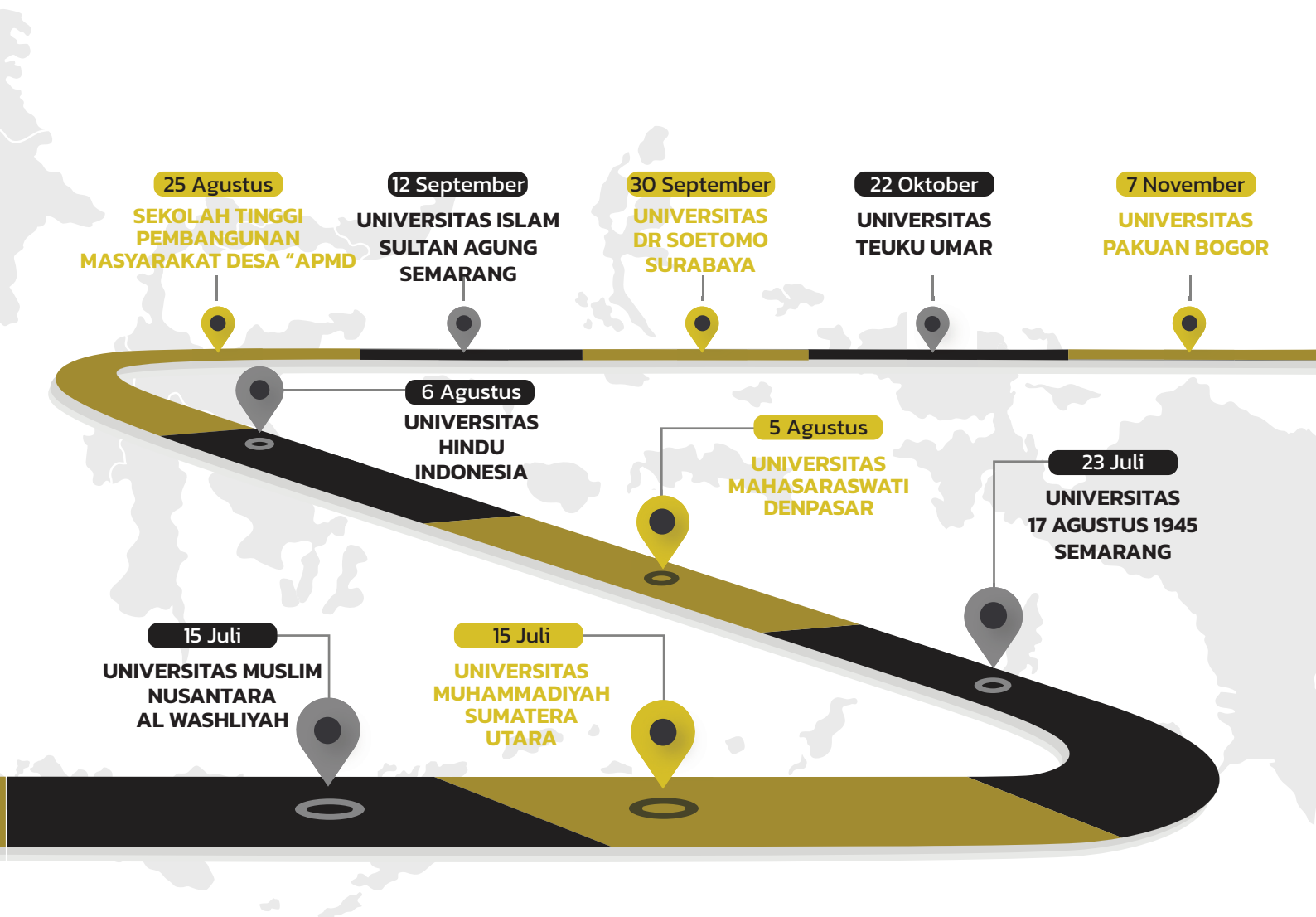


PERLUAS RELASI KUATKAN KOLABORASI



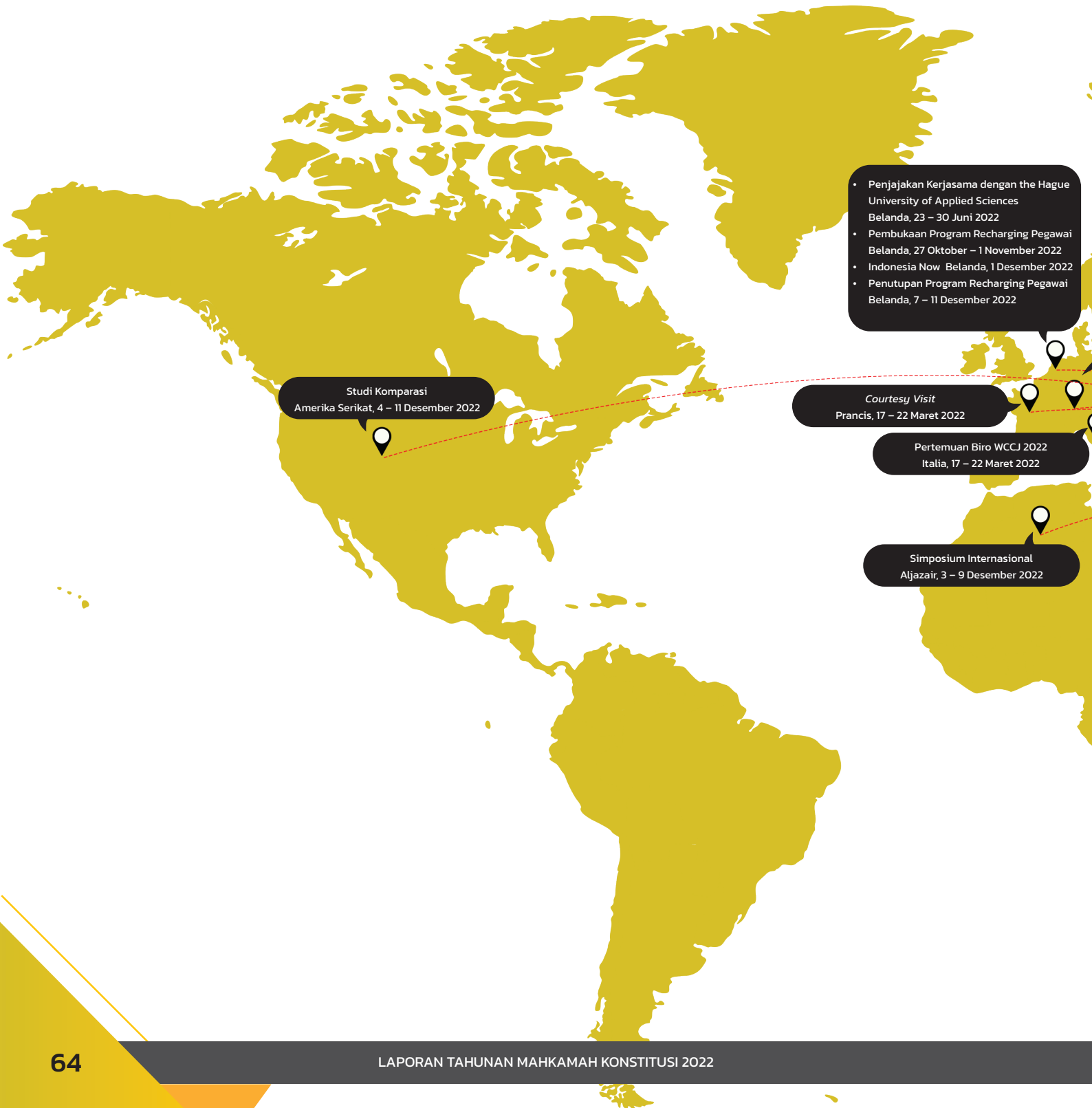
SINERGI KEMBANGKAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Tahun ini, masih dalam kerangka meningkatkan kesadaran warga negara dan penyelenggara negara dalam berkonstitusi, MK memperluas relasi melalui penandatanganan secara digital nota kesepahaman dengan 17 perguruan tinggi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan 11 mitra kerja lainnya.



INTERAKSI AKTIF DALAM KIPRAH GLOBAL

Sebagai bagian dari komunitas peradilan konstitusi dunia, MK terus membangun dan menjalin komunikasi dengan mitra dari berbagai negara. Dialog yudisial dikembangkan untuk mendapatkan input guna memperluas wawasan dan berbagi pengalaman untuk peningkatan performa kelembagaan MK. Hal ini dilakukan melalui anjangkarya Hakim Konstitusi ke berbagai peradilan konstitusi atau institusi lain yang relevan.



Nota Kesepahaman

- Kerja Sama MKRI dengan MK Namibia, Bali (Kegiatan Kongres WCCJ ke-5), 5 Oktober 2022
- Kerja Sama MKRI dengan National Center of State Courts, Amerika Serikat, 5 Desember 2022
- Kerja Sama MKRI dengan William & Mary Law School, Kamis, Amerika Serikat, 18 Desember 2022



PENUHI HAK PUBLIK ATAS INFORMASI

Seluruh aktivitas MK, baik di dalam maupun di luar persidangan, tidak lain merupakan peristiwa publik. Ini konsekuensi MK sebagai lembaga negara. Dengan begitu, publik memiliki hak untuk tahu (*rights to know*). Maka, kewajiban MK untuk memenuhi hak tersebut. Untuk itu, MK membuka seluas-luasnya akses informasi berdomain publik, antara lain melalui Podcast SUPREMASI, penyediaan informasi kekinian melalui media sosial, laman MK yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas, keterbukaan dan kemudahan MK untuk dikunjungi masyarakat serta pemberitaan di media massa.



BIN CANG KONSTITUSI DI PODCAST



Memperluas kesadaran berkonstitusi di masyarakat terutama generasi milenial, MK merilis program podcast bernama “Supremasi” pada 2020 silam. “Supremasi” yang dipandu oleh Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono mengundang sejumlah narasumber, di antaranya Ketua MK periode 2003 – 2008 Jimly Asshiddiqie, Mantan Ketua MA Bagir Manan, aktivis pemilu dan demokrasi Titi Anggraini, dan lainnya. Pada 2022, “Supremasi” hadir dalam dua episode dengan narasumber, yakni Peneliti Youth Laboratory Indonesia Muhammad Faisal dan Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia.

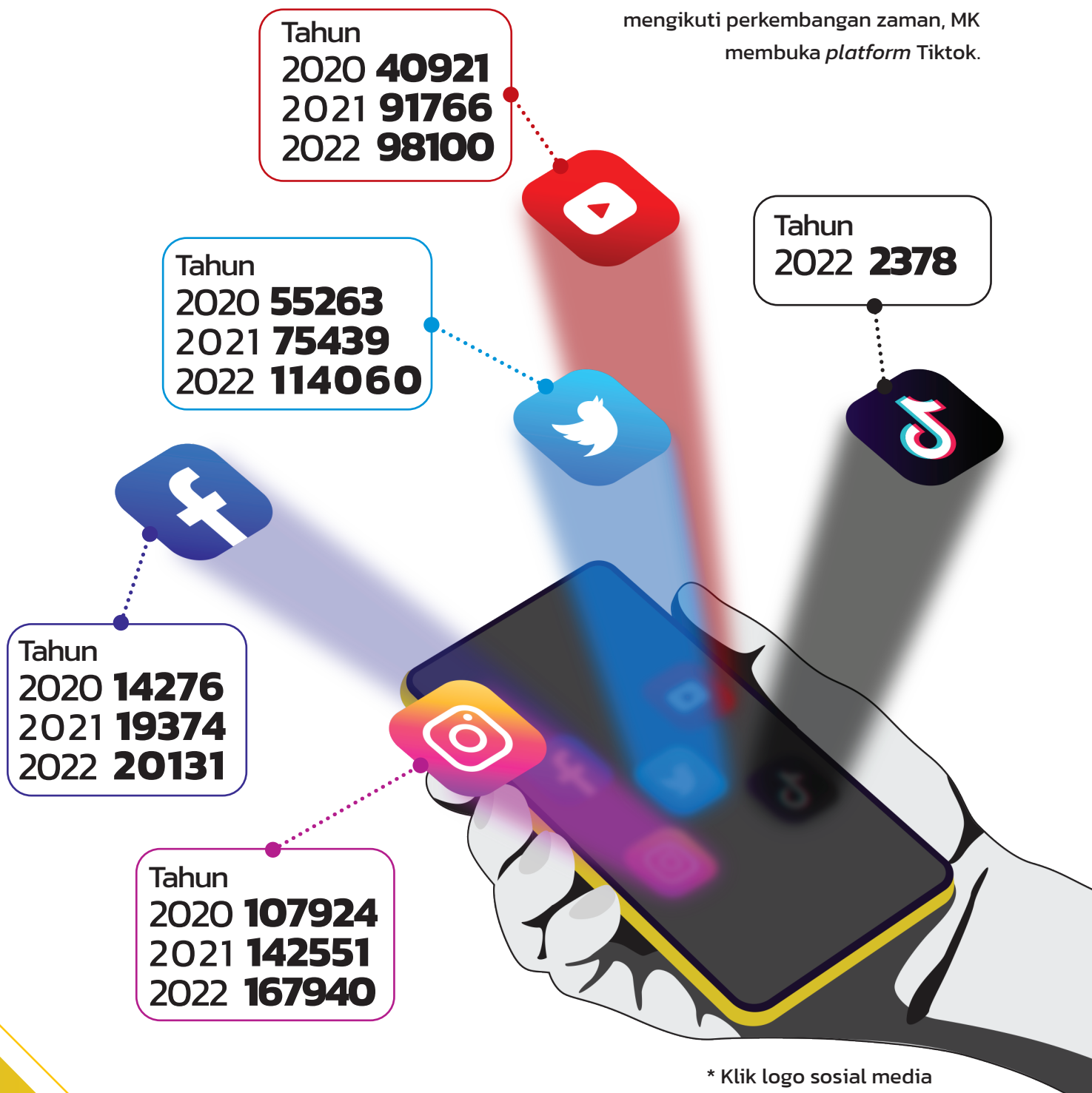


SU·PRE·MA·SI
a podcast by **mkri**

INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL

Jumlah Perkembangan Pengikut Media Sosial

Sebagaimana diketahui, MK memiliki sejumlah media sosial guna menyebarluaskan informasi kepada publik baik tentang persidangan maupun setiap kegiatan yang berlangsung di MK. Tahun-tahun sebelumnya, MK hanya memiliki media sosial di lima *platform*, yakni Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan Spotify. Pada pertengahan 2022, untuk mengikuti perkembangan zaman, MK membuka *platform* Tiktok.



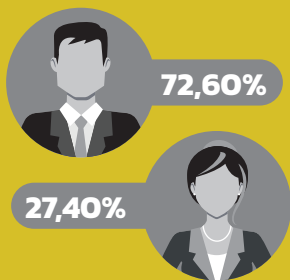
* Klik logo sosial media

DEMOGRAFI PENGIKUT MEDIA SOSIAL

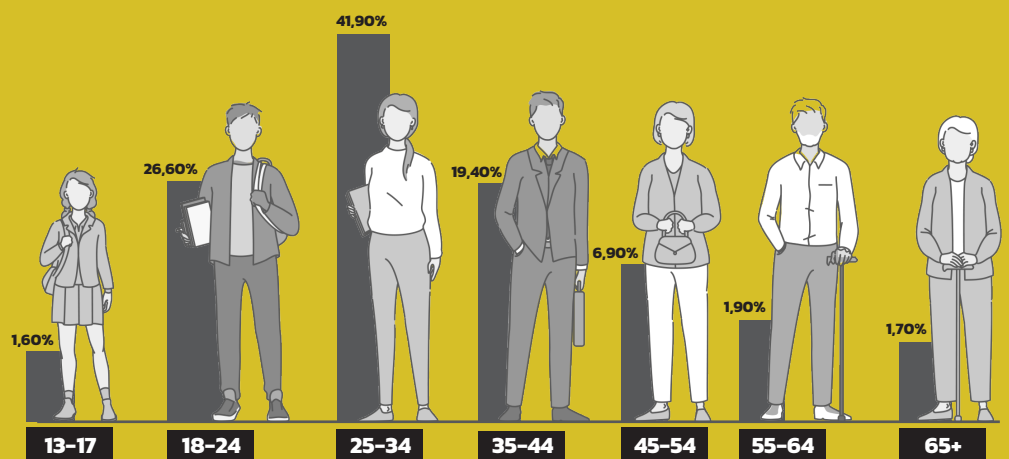
KOTA



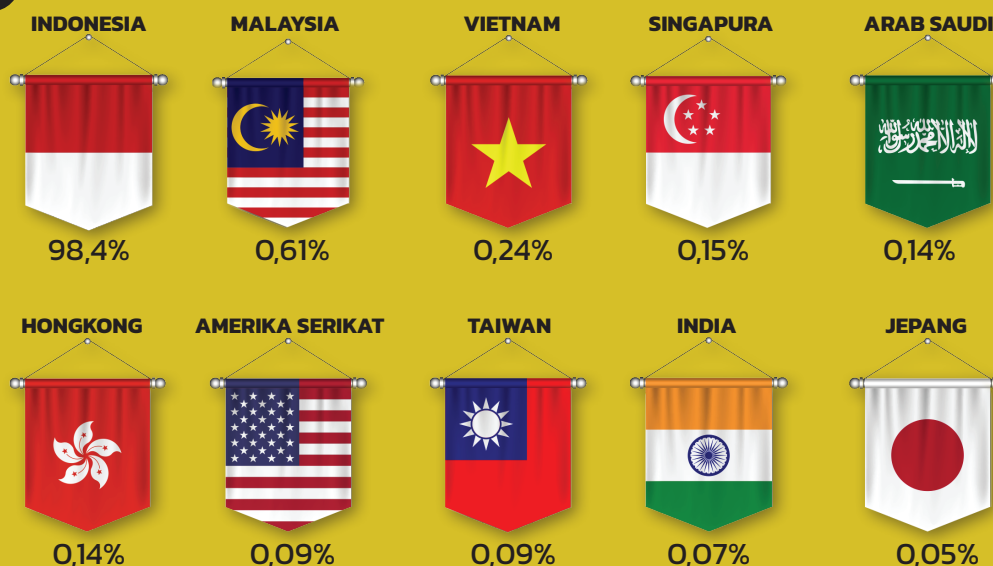
JENIS KELAMIN



USIA



NEGARA



LAMAN MK RAMAH PENYANDANG DISABILITAS

Pada 2022, MK melakukan penambahan fitur yang memudahkan para pencari keadilan dengan disabilitas. Hal ini dilakukan MK sebagai upaya untuk memenuhi hak aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Fitur tambahan yang dimaksud disebut *text-to-speech reader* (TTS) dan juru bahasa isyarat bagi sidang putusan.



MK TERBUKA DIKUNJUNGI

Sejak membatasi kunjungan tatap muka selama dua tahun karena pandemi Covid-19, MK mulai menerima kembali kunjungan pada pertengahan tahun 2022, baik secara daring maupun luring

JUMLAH KUNJUNGAN

7
DARING

16
LURING

KATEGORI PENGUNJUNG

16
Perguruan
Tinggi

4
Sekolah

3
Umum

PEMBERITAAN MK DI MEDIA MASSA

Sebagai bagian dari pilar demokrasi, hubungan antara MK sebagai peradilan dengan media massa saling bersinergi. Selain sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, namun juga sebagai pengawas bagi proses berjalannya demokrasi termasuk juga lembaga peradilan seperti MK. Sepanjang 2022, fokus pemberitaan tentang MK meliputi tiga hal.

1 Perkembangan
Penyelenggaraan Pemilu 2024

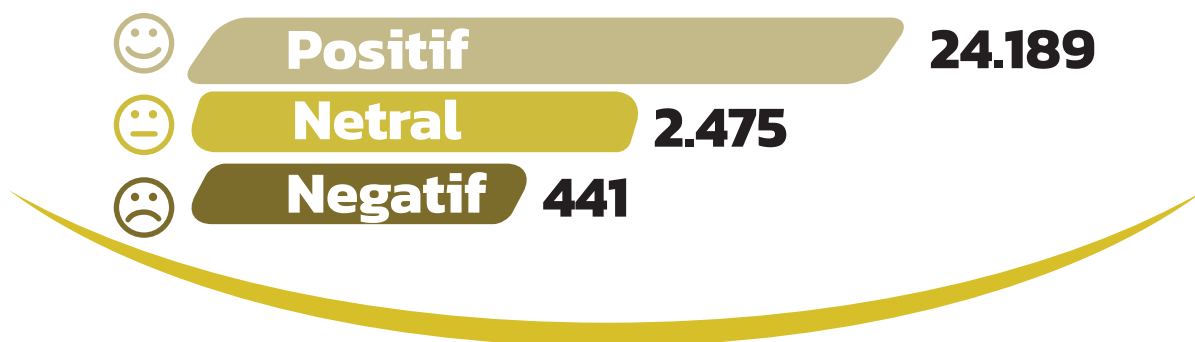
2 UU Pemilu tentang
Ambang Batas Digugat di MK

3 Pasca MK Gelar Sidang Putusan
PUU 11/2020 Tentang Cipta Kerja



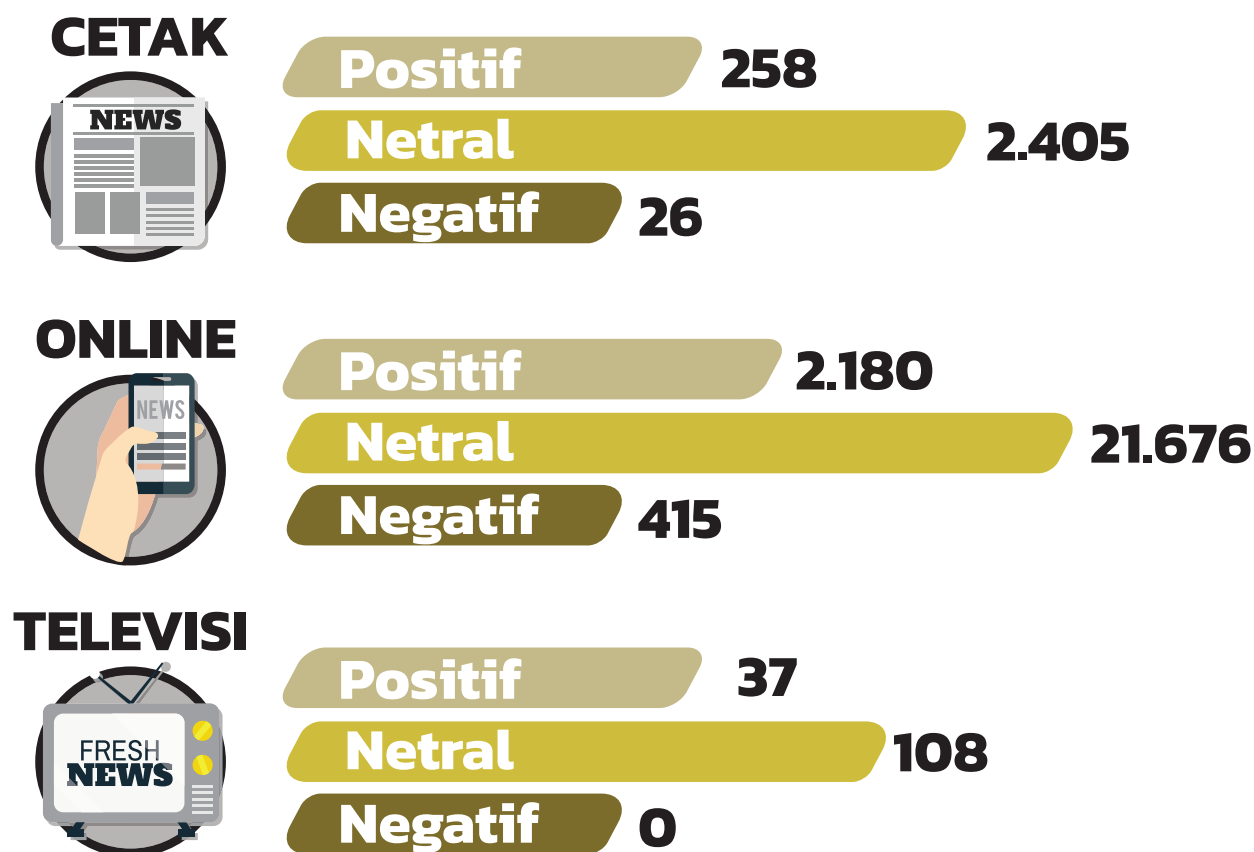
BERITA BERDASARKAN SENTIMEN

Jika dilihat dari sentimen, pemberitaan MK didominasi oleh sentimen netral sebanyak 24.189, lalu pemberitaan positif sebanyak 2.475 dan pemberitaan negatif sebanyak 441.



BERITA BERDASARKAN TIPE MEDIA

Berdasarkan tipe media, yaitu media cetak, online, dan televisi pemberitaan positif dan negatif dijumpai paling banyak di media online.



MENINGKATKAN **KUALITAS PUTUSAN**



Putusan merupakan hasil dan produk akhir setelah rangkaian proses pencarian dan penemuan solusi atas problem hukum warga negara yang diajukan untuk diselesaikan MK. Inti kemuliaan MK terletak di putusan. Di putusan pula, keadilan berkepastian dicerminkan dan disuarakan. Maka, Putusan adalah mahkota MK. Seiring dengan misi ketiga, "Meningkatkan Kualitas Putusan", tahun ini MK terus menempuh langkah dan upaya beragam yang berorientasi pada penciptaan putusan yang lebih berkualitas. Tahun ini, upaya meningkatkan kualitas putusan dilakukan melalui berbagai langkah dan upaya.



ASLI: TRANSFORMASI DUKUNGAN SUBSTANSIAL

Jabatan fungsional Peneliti di Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MK ditransformasikan ke Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Ini tidak terlepas dari penyediaan dukungan aspek substansial kepada Hakim Konstitusi dalam memutus perkara. Transformasi ini diarahkan agar fokus dukungan substansial Asisten Ahli Hakim Konstitusi semakin meningkatkan kualitas putusan. Tahun ini, 25 orang Peneliti secara resmi dilantik dan diambil sumpah menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Prosesi pelantikan dilaksanakan pada Rabu, 31 Agustus 2022 di Aula Gedung I MK.



Dukungan substansial untuk setiap perkara PUU diberikan melalui penyusunan kajian perkara oleh Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Kajian disusun dan diserahkan kepada Hakim Konstitusi sebagai inside dan tambahan perspektif yang bersifat tidak mengikat. Dari 121 perkara PUU yang diregistrasi tahun 2022, telah disusun sebanyak 121 kajian perkara. Artinya, capaian penyusunan tercapai 100%.



PEMBARUAN REGULASI **TATA BERACARA**

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum, kebutuhan, dan situasi terkini, MK memperbarui sejumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terutama berkenaan dengan tata beracara dalam perkara PUU. Pada 2022, MK membahas tiga rancangan PMK.

**PMK tentang Pemilihan Ketua
dan Wakil Ketua MK**

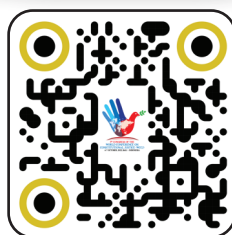
**PMK tentang Tata Beracara
dalam Perkara Pengujian
Formil Undang-Undang**

**PMK tentang Tata Beracara
dalam Perkara Pengujian
Materiil Undang-Undang.**



TAMBAH ILMU DENGAN MENJADI HOST KONGRES KE-5 WCCJ

World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) adalah konferensi peradilan konstitusi sedunia yang memfasilitasi dialog yudisial antarperadilan konstitusi dalam skala global. Kongres kelima WCCJ dengan tema "Constitutional Justice and Peace" diselenggarakan pada 4-7 Oktober 2022 di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali. Kongres ini dihadiri delegasi Mahkamah Konstitusi/lembaga sejenis dari 92 negara dan empat organisasi hukum konstitusi internasional.





Anwar Usman
Ketua Mahkamah Konstitusi

"Kongres ini berhasil dihimpun gagasan peran lembaga peradilan konstitusional, harus menjadi penyeimbang dari peran lembaga negara lainnya, selain juga untuk mengawal tegaknya prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara."



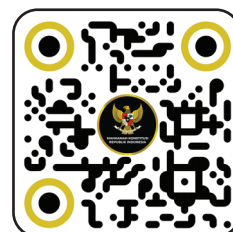
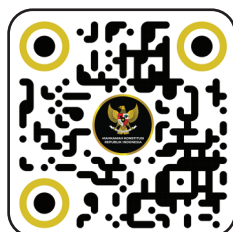
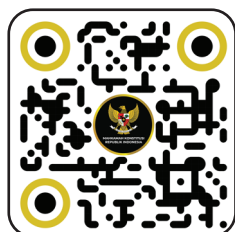
Ir. Joko Widodo
Presiden RI

"MKRI merupakan pilar utama dalam menegakkan keadilan konstitusional yang merupakan elemen kunci dari demokrasi perlindungan HAM DAN kepastian hukum. Tugas itu semakin penting kala semua negara di dunia harus menangani berbagai krisis. Pandemi belum berakhir, Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit dan dunia dikejutkan dengan adanya perang antara Rusia-Ukraina, yang menghancurkan rantai pasok perdagangan dunia."



Gianni Buiquicchio
Presiden Emeritus Venice Commission

"Perdamaian harus dapat dicapai melalui kontrol peradilan konstitusi, meski masih banyak suara yang mengatakan peradilan konstitusi memiliki keterbatasan dalam menciptakan perdamaian yang demokratis. Perdamaian sejati bukan hanya tidak adanya ketegangan, perdamaian sejati adalah sebuah kondisi adanya keadilan."



BALI COMMUNIQUE

Di samping menjadi forum bagi MK untuk berbagi ilmu dan pengalaman dari berbagai lembaga peradilan konstitusi pelbagai negara, kongres ini juga menjadi ajang untuk menggemakan sistem hukum berdasarkan Pancasila yang dianut Indonesia. Tujuan utamanya agar sistem hukum Indonesia dapat menjadi rujukan sistem hukum negara hukum demokratis di berbagai belahan dunia. Kongres berlangsung sukses diikuti sebanyak 96 lembaga peradilan konstitusi dari 5 benua dan menghasilkan kesepakatan berupa “Bali Communique”.



JOINT STATEMENT AACC DAN CCJA

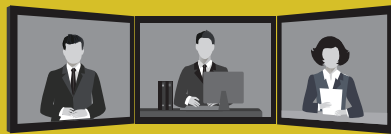
Dalam rangkaian Kongres ke-5 WCCJ, juga digelar pertemuan bersama untuk pertama kalinya antara Association of Asian Constitutional Court (AACC/Asosiasi MK se-Asia) dengan Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA/Konferensi MK se-Afrika) dengan diilhami oleh semangat Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dari pertemuan ini, disepakati *Joint Statement AACC-CCJA*. Baik Kongres ke-5 WCCJ maupun pertemuan AACC-CCJA diharapkan membawa implikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi seluruh peserta, terutama MK, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk pada gilirannya meningkatkan kualitas putusan.



ICCIS TINGKATKAN KONTRIBUSI DUKUNG PENANGANAN PERKARA



Dalam rangkaian Kongres ke-5 WCCJ, digelar pertemuan ilmiah berupa The 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) pada 5 – 7 Oktober 2022. Adapun tema yang diusung ialah “Constitutional Court and Conflict Resolution”. Dihadirkan 27 pembicara dan penanggap dari berbagai negara dalam sesi simposium tersebut. Dari pertemuan ilmiah ini, dihasilkan sejumlah perspektif mengenai peran MK dalam dinamika penegakan konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara di masing-masing negara, termasuk Indonesia. Bagi MK, bahasan perspektif ilmiah tersebut dapat didayagunakan dan dikontribusikan untuk meningkatkan kualitas putusan.



27 pembicara
dan penanggap
hadir secara luring

300 peserta
secara daring



KOMPARASI *BEST PRACTICES* DUKUNGAN KEPADA MK

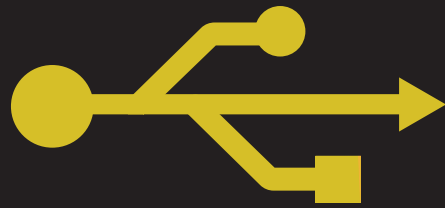
Dalam kapasitas sebagai Sekretariat Tetap AACC, melanjutkan program tahun sebelumnya, MK kembali menggelar International Short Course. Acara ini digelar beriringan dengan Kongres ke-5 WCCJ pada 5 – 6 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali dengan tema “Peace, Election, and Democracy”. Acara ini diikuti delegasi dari 99 negara (73 hadir luring dan 26 hadir secara daring) yang terdiri dari aparatur lembaga peradilan. Melalui acara ini, peserta saling berbagi wawasan informasi mengenai praktik terbaik di masing-masing lembaga. Dari pertukaran informasi ini, MK dapat mengambil daya manfaat untuk agenda meningkatkan kualitas putusan.



Kursus Singkat AACC 2022 diikuti **99** delegasi, **73** luring dan **26** daring dengan latar belakang peserta lembaga negara dan organisasi.



RECHARGING PROGRAM 2022



Recharging Program Tahun 2022 merupakan kerja sama MK dengan The Hague University of Applied Sciences (THUAS) Belanda diselenggarakan pada 31 Oktober – 9 Desember 2022. Selama enam pekan, 7 pegawai MK yang terdiri dari 1 Panitia Pengganti, 3 Asisten Ahli Hakim Konstitusi, 1 Analis Hukum, 2 Pengolah Data Perkara dan Putusan, serta Analis Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, menerima materi “The Digital Transformation of Constitutional Adjudication in the Covid-19 Era: Legal and Ethical Dimensions”.



IKUT *SUMMER SCHOOL*

Tiga pegawai MK menjadi peserta “the 10th Summer School Program” dengan tema “Interpretation of the Constitution in the Protection of Fundamental Rights and Freedom” pada 21–24 September 2022 yang digelar MK Turki. Dari acara ini, peserta mendapatkan wawasan dan pandangan tambahan perihal metode

penafsiran konstitusi. Bagi MK, keikutsertaan pegawai dalam acara ini merupakan upaya tidak terpisahkan untuk menaikkan derajat kompetensi pegawai untuk lebih berkontributif memberikan dukungan substansial guna meningkatkan kualitas putusan.



KONTRIBUSI MK DALAM **DELRI**

MK mengirimkan dua pegawai sebagai bagian dari Delegasi RI (Delri) yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, 7 – 14 November 2022. UPR merupakan mekanisme berkala silang *review* berbagai negara di dunia, khususnya 193 negara anggota PBB atas kondisi perlindungan dan penghormatan HAM di negara masing-masing yang dilakukan secara berkala setiap 4 – 5 tahun sekali.

Melalui acara ini, disampaikan capaian HAM Indonesia dalam 5 tahun terakhir, sekaligus internasionalisasi Putusan MK, khususnya terkait dengan perlindungan HAM. Banyak Putusan MK yang berkaitan dengan perlindungan HAM, antara lain menyangkut konstitusionalitas dan keberlakuan pidana mati di Indonesia, kebebasan beragama, hak untuk menjadi kandidat (*right to be candidate*), pengakuan hak memilih penyandang disabilitas mental, pemajuan hak-hak perempuan dan anak-anak, hak anak yang lahir di luar kawin, dan lain-lain. Putusan-putusan ini, berkontribusi dan menguatkan capaian perlindungan HAM di Indonesia.

PROYEKSI 2023





Pemilu serentak, termasuk Pemilukada, sudah dekat di depan mata. Waktunya segera tiba menjelang gelarannya pada 2024. Maka, tahun 2023 merupakan waktu bagi MK untuk sebaik mungkin mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran dan kualitas penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHP). Dalam proses dan tahapan Pemilu, MK berperan di ujung akhir, yakni memutus manakala timbul PHPU. Untuk itu, sepanjang tahun 2023, sebagian besar energi dan sumber daya MK diberdayakan untuk memberikan dukungan, yaitu (1) Penyelenggaraan Bimtek Hukum Acara MK, (2): *workshop* bagi pegawai, baik untuk administrasi peradilan, administrasi umum, dan pengamanan; dan (3) peningkatan sarana dan prasarana ICT dan gedung.

1

Melalui penyelenggaraan bimbingan teknis hukum acara, MK memberikan tambahan pemahaman dan penguasaan kepada para pemangku kepentingan pemilu, baik Penyelenggara maupun Peserta Pemilu mengenai hukum acara MK, terutama hukum acara perselisihan hasil Pemilu bagi. Penyelenggaraan bimbingan teknis berkontribusi meningkatkan secara keseluruhan kualitas penanganan perkara.

2

Guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai (internal), MK menyelenggarakan secara bergelombang *workshop* bagi pegawai administrasi peradilan, administrasi umum, dan pengamanan, untuk memberikan dukungan dan layanan terbaik selama penanganan perselisihan hasil pemilu.

3

MK mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana berupa dukungan ICT dan perluasan gedung yang ditujukan untuk kelancaran penanganan perkara dan mewujudkan *access to justice* bagi setiap masyarakat terhadap MK.

LAMPIRAN



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 23529000
email: office@mkri.id
www.mkri.id